

**PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA
BARAT PROPINSI MALUKU UTARA**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara
Universitas 45 Makassar

Oleh :

RINI WA HYUNI

45 00 021 007

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2004

PERSTASIAAN

HALAMAN PENERIMAAN

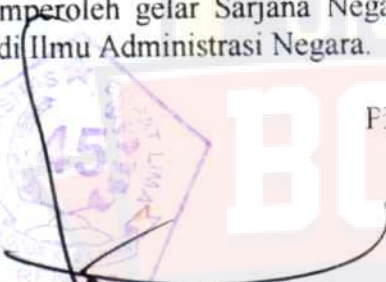
Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat, Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA yang disusun oleh :

Nama : Rini Wahyuni
 STB : 45 00 021 007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Administrasi Negara

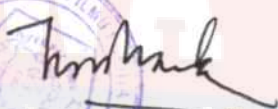
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S₁) dalam jurusan Ilmu Administrasi program studi Ilmu Administrasi Negara.

PENGAWAS UMUM




Prof. Dr. H. Rahmat Baro, SH, MH
 Rektor Universitas 45

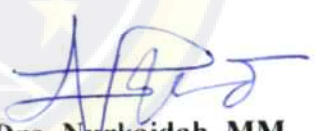



Drs. H. Husain Hamka, MS
 Dekan Fisipol Univ. 45

PANITIA UJIAN



Dra. Asmirah, M.Si
 Ketua



Dra. Nurkaidah, MM
 Sekretaris

TIM PENGUJI

- Drs. H. Husain Hamka, M.Si
- Dra. Juharni. M.Si
- Drs. Rusdi Maidin, SH. M.Si
- Drs. Syamsuddin Maldum


 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan di
Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat
Propinsi Maluku Utara.
Nama Mahasiswa : Rini Wahyuni
Nomor Pokok : 4500021007
Jurusan : Administrasi Negara
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Telah mengikuti Ujian Skripsi setelah memenuhi persyaratan akademik yang telah
ditetapkan.

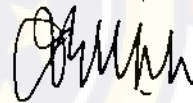
Menyetujui

Pembimbing I



Drs. H. Husain Hamka, Ms

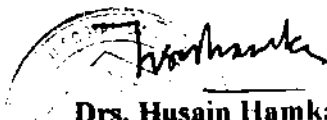
Pembimbing II



Dra. Asmirah, MSi

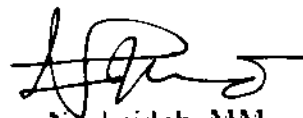
Mengesahkan :

Makassar,
Dekan Fisipol Univ. 45



Drs. Husain Hamka, MSi

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi



Dra. Nurkaidah, MM

KATA PENGANTAR

Dengan rasa tulus yang dalam, Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sekalipun bentuknya sangat sederhana.

Penulis menyadari, dalam menyelesaikan skripsi ini tidak semudah perkiraan sebelumnya, sehingga berbagai ragam kesulitan penulis temui dan hadapi.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengakui akan kemampuan penulis yang sangat terbatas, untuk itu atas bantuan serta bimbingan dari semua pihak maka dengan kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) **Bapak Dr. H.Rahmat Baru, SH.MH.** selaku Rektor Universitas 45 Makassar
- 2) **Bapak Drs. Husain Hamka, MS.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar
- 3) **Ibu Dra. Nurkaidah, MM dan Bapak Drs. Natsir Tompo** selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas 45 Makassar
- 4) **Bapak Drs. Husain Hamka, MS dan Ibu Asmira Johan, M.Si.** selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sampai selesainya skripsi ini.
- 5) **Bapak Kepala Kecamatan Sahu beserta Stafnya** atas bantuannya selama Penulis melakukan penelitian.
- 6) **Bapak Ibu Dosen Fisip Universitas 45 Makassar** yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya serta **Ibu Jernih, Ibu Rahma, Kak Herman dan Joli** yang tidak bosan-bosan melayani.
- 7) **Sembah sujud kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Djalal Fara, BA dan Ibunda Aty Bada (Almarhumah)** yang telah mendidik, memberi pendidikan dan sampai detik ini selalu mengajarkan betapa berharganya nilai kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan serta selalu mencurahkan kasih sayangnya. Tidak

lupa ucapan banyak terima kasih pada **Ibunda Nurani Djalal** yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kesabaran. Kepada kedua adikku **Nanang** dan **Eda** yang setia memberi dorongan tanpa pamrih. Untuk **kedua nenekku** dan **seluruh keluarga yang tercinta** terima kasih atas do'anya selama ini.

8) Kepada sobat-sobatku yang tiada henti menghibur dengan canda tawa dan membangkitkan semangatku :

- Crew MC 3 tempat kost yang paling nyaman kalian sahabat terbaikku dalam suka dan duka : **Reni, Ria, K'Onha, K'Pit, D'Fit, D'Yani, Dewi dan Rini**. Kebersamaan kita tidak akan kulupakan.
- **Pengurus dan Anggota IPMI HALBAR, Anak-anak Aspura Maluku Utara**. Thank's atas bantuannya.
- **Teman-teman FISIP angkatan 2000, Adik-adik FISIP (HIMAN) angkatan 2001-2002** jayalah terus dengan bendera HIMAN. Special to Boy Friend yang akan datang, dan **teman-teman KKN angkatan XXIX Kecamatan Belopa-Palopo** khususnya Desa Seinga Selatan.

9) Kepada semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih yang tidak terhingga pula.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan maupun pembahasan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis dengan rendah hati dan terbuka mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri Penulis, keluarga, para pembaca dan masyarakat.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa baik dari semua pihak dalam rangka penulisan skripsi ini hingga selesainya, Penulis do'akan semoga mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Makassar, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Koordinasi	17
B. Hakekat Koordinasi Sebagai Upaya Penciptaan Efisiensi.....	20
C. Dasar dan Pentingnya Koordinasi Dalam Pembangunan	24
D. Pengertian Pembangunan Desa	26
E. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.....	31

Bab III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis	36
B. Keadaan Demografi	36
C. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	38
D. Keadaan Sosial Budaya dan Agama	38
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Sahu	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi antar instansi di Kecamatan Sahu	43
B. Kegiatan Pembangunan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sahu	65
C. Hambatan dan Tindak Lanjut	68
D. Hasil Yang Dicapai	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-Sara	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penyebaran Penduduk Kecamatan Sahu Dirinci Menurut Golongan Umumr dan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 2	Tindak Penduidiakan Penduduk Kecamatan Sahu.....	39
Tabel 3	Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Sahu	40
Tabel 4	Keadaan Pemeluk Agama Dalam Wilayah Kecamatan Sahu.....	40
Tabel 5	Tanggapan Responden Tentang Tanggung jawab Camat Dalam Koordinasi Pembangunan di Kecamatan Sahu.....	51
Tabel 6	Tanggapan Responden Tentang Hubungan Kerjasama Dalam Koordinasi Pembangunan di Kecamatan Sahu.....	54
Tabel 7	Tanggapan Responden Tentang Kesiambungan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan di Kecamatan Sahu.....	56
Tabel 8	Tanggapan Responden Tentang Usaha Kelompok Dalam Pembangunan di Kecamatan Sahu.....	58
Tabel 9	Tanggapan Responden Tentang Konsep Kesaatuan Tindakan Hubungan Dalam Pembangunan di Kecamatan Sahu.....	60
Tabel 10	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pemberian Informasi dan Laporan Dalam Koordinasi Pembangunan di Kecamatan Sahu.....	62
Tabel 11	Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Instansi Terkait Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Sahu.....	64
Tabel 12	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Atas Rencana Yang Telah Ditetapkan.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pemerintah menempuh berbagai macam kebijaksanaan dengan melaksanakan berbagai macam pembangunan, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini, pemerintah menggalakkan dan berorientasi pada pembangunan di Daerah Pedesaan, hal ini disebabkan penduduk di Indonesia adalah mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang sasaran utamanya adalah terciptanya iklim landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Hal ini bahwa penduduk daerah pedesaan adalah merupakan salah satu faktor modal dasar pembangunan nasional. Dengan jumlah warga masyarakat yang ada di pedesaan yang sangat besar itu, dapat dibina dan dibimbing dengan baik karena merupakan sumber modal yang efektif untuk berbagai sektor kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Dari itu sangat perlu difokuskan perhatian dan peningkatan pembangunan desa terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat demi terselenggaranya tujuan pembangunan secara nasional tersebut sebagai

perwujudan dan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersatu, tertib dan damai.

Berpijak dari tujuan pembangunan nasional tersebut secara garis besarnya bertitik tolak pada bidang ekonomi mengingat masih rendahnya taraf hidup sebagian masyarakat utamanya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan oleh karena itu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa adalah dengan jalan melaksanakan pembangunan secara integral pada masyarakat desa, berdasarkan bimbingan serta kekuatan sendiri atau potensi-potensi yang ada dalam masyarakat setempat, bantuan dari pihak pemerintah yang merupakan satu kesatuan dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai pencerminan kepentingan nasional yang bulat dan menyeluruh.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan utamanya pembangunan desa sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah peran pemerintah yang mempunyai inisiatif, perencanaan dan pembiayaan dari program kegiatan berdasarkan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu pemerintah mengikuti suatu pola, sistem dan mekanisme yaitu dari tingkat sebagai perumus kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah

kabupaten sebagai perumus kebijaksanaan pelaksanaan sampai kepada kepala kecamatan dan desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan,

Pada tingkat kecamatan, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Camat beserta aparatnya, wakil Instansi Vertikal, Dinas Daerah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Kepala Kecamatan bertanggung jawab atas terselenggaranya semua kegiatan pembangunan pada tingkat kecamatan, untuk mengendalikan pembangunan pemerintah wilayah kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, koordinasi dengan semua aparat pemerintah dan instansi Vertikal, Dinas Daerah, pemuka masyarakat mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaannya agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa organisasi pemerintah wilayah kecamatan sangat kompleks, maka kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sangat perlu diimbangi dengan memantapkan koordinasi agar tercapai mekanisme kerja yang lebih baik. Koordinasi yang baik dari kepala Kecamatan terhadap instansi Vertikal dan instansi otonom di wilayahnya, merupakan faktor penunjang terselenggaranya program-program pembangunan di tingkat kecamatan guna pencapaian tujuan pemerintah dengan menghindari perselisihan-perselisihan yang sering timbul antara sesama unit kerja dan mengusahakan kerjasama yang baik antara unit-unit kerja dengan organisasi pemerintahan tersebut.

Pelaksanaan koordinasi selain sebagai upaya untuk menetapkan tindakan, juga sebagai alat untuk mengawasi tindakan tersebut apakah sesuai dengan yang diharapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan terhadap masalah koordinasi bukan hanya kerjasama tetapi merupakan integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelenggaraan unsur jumlah penentuan waktu kegiatan di samping penyelenggaraan perencanaan dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara semua pejabat dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu pengaturan pelaksanaan. Selain itu diharapkan bahwa koordinasi itu dapat memelihara jalannya roda pemerintahan yang baik serta mempermudah pelaksanaan pembangunan, khususnya pada tingkat kecamatan koordinasi ini dapat menciptakan iklim yang baik dari program pemerintah yang telah ditetapkan serta menciptakan integrasi kerja antar wilayah dengan instansi di wilayah kecamatan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Kepala Kecamatan Kecamatan mempunyai wewenang untuk menjalankan koordinasi dengan semua aparat pemerintahan dan instansi vertikal, dinas daerah. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan dalam satu pola yang serasi dan saling menunjang untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Sebaliknya dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan desa tersebut, instansi vertikal, dan dinas daerah mempunyai kewajiban melaporkan segala bentuk kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan -serta mematuhi segala petunjuk yang diberikan oleh Kepala Wilayah. Seperti halnya pembangunan desa baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, agar dapat berhasil dengan baik maka sangat perlu pemerintah wilayah, instansi vertikal, dinas daerah menyusun rencana pelaksanaannya dengan berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat di daerah pedesaan.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara yang merupakan salah satu daerah sasaran pembangunan yang sedang digalakkan, dan disusun dalam bentuk skripsi.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembahasan laporan akhir ini berpatokan pada masalah pelaksanaan koordinasi pembangunan desa Kecamatan Sahu, Kabupaten Alamahera Propinsi Maluku Utara yang jangkauannya luas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada upaya pelaporan yang dilakukan oleh aparat, instansi vertikal, dan dinas daerah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan kepada kepala wilayah tentang bidang tugas dan kegiatannya sering tidak terlaksana baik akibat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu konsep pembangunan jangkauannya sangat luas, dengan demikian penulis membatasi daripada masalah, mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan itu sendiri, dalam hal pembangunan desa utamanya pembangunan fisik yaitu dalam bidang prasarana dan sarana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam pembahasan laporan akhir ini penulis memberi batasan-batasan pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah koordinasi antar instansi di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ?
2. Kegiatan-kegiatan pembangunan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ?
3. Faktor apakah yang menghambat dan tindak lanjut apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ?
4. Bagaimana hasil yang dicapai pembangunan desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui koordinasi antar instansi di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

- b. Untuk mengetahui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat .
- d. Untuk mengetahui hasil yang dicapai pembangunan desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

2. Kegunaan penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan disiplin ilmu sosial dan ilmu politik, serta ilmu pemerintahan khususnya masalah koordinasi pembangunan desa bagi Pamong Praja atau bagi yang berminat mengetahuinya lebih lanjut.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi input bagi pemerintah di tingkat kecamatan, agar nantinya dalam pelaksanaan pembangunan desa lebih terarah serta efektif.

D. Kerangka Konseptual

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dan pengendalian yang merupakan hal penting bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasional, sehingga tujuan dan haluan tidak menyimpang dari rencana.

Di bidang pemerintahan koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada unit-unit kerja yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara efisien.

Koordinasi merupakan kerjasama instansi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan dari semua pihak yang berjalan secara harmonis dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang jelas yaitu perwujudan pembangunan yang menempatkan manusia pada titik sentral baik sebagai pelaku maupun sebagai tujuan pembangunan, hal ini berkaitan pula dengan keadaan bahwa bila kita koordinasi, maka dapat dipastikan bahwa bagian-bagian atau komponen-komponen tersebut tidak berperan dalam organisasi pemerintah (Ateng Syafruddin, 1993 = 268).

Untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi pembangunan desa digunakan cara menganalisa peran aparat pemerintah dan non pemerintah, instansi vertikal, dinas daerah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan yang berbeda sebagai mitra pembangunan masyarakat di tingkat kecamatan.

Pelaksanaan koordinasi pembangunan desa yang akan diteliti di tingkat Kecamatan Sahu a mengacu pada profil kegiatan perencanaan sampai pada pelaksanaan dan faktor-faktor, yang menghambat dan mendukung serta hasil-hasil yang dicapai.

Profil kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah, non pemerintah, instansi vertikal, dinas daerah dan masyarakat, dengan menggunakan parameter ukuran dengan hasil yang dicapai.

Kegiatan perencanaan yaitu kegiatan menyusun dengan berdasar/bersumber pada kondisi masyarakat yang diimbangi dengan kemampuan perencanaan. Dalam menyusun rencana pelaksanaan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk bidang-bidang non fisik tersebut dengan berorientasi pada masyarakat di pedesaan, sedangkan kegiatan pelaksanaan adalah

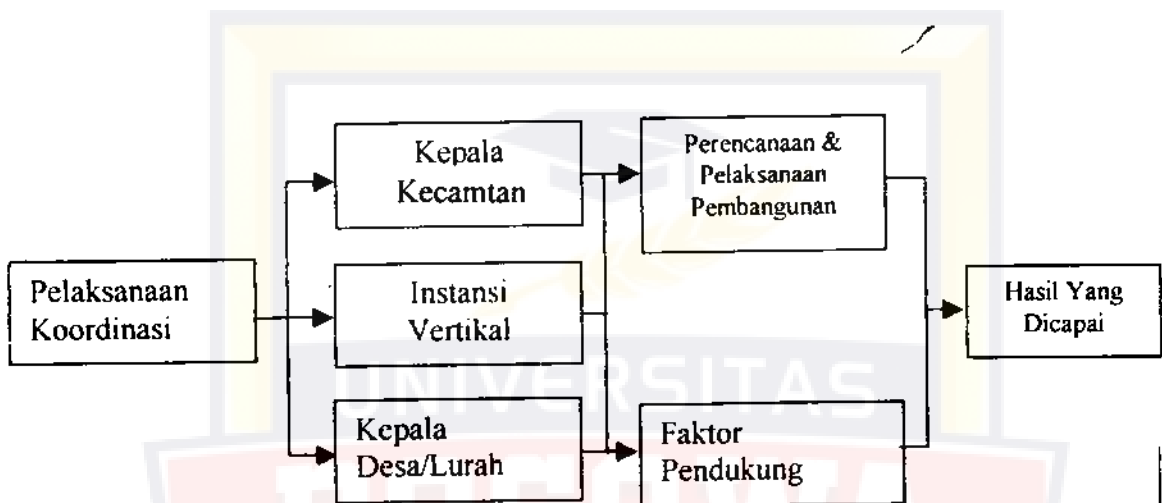
kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang diintrodusir dalam masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan yang secara konkrit yang dapat saja berupa pembangunan fisik atau non fisik.

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan yang meliputi bidang prasarana dan sarana, sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan mental dan spritual masyarakat dipedesaan. Dengan melihat kenyataan yang ada, maka pelaksanaan koordinasi pembangunan desa di tingkat kecamatan dalam arti merencanakan sampai kepada pelaksanaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan perubahan yang dimaksud, dari awal hingga saat ini pemerintah telah berusaha tetapi hasil yang diharapkan/didapat masih jauh dari apa yang diharapkan disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor yang dimaksud mempengaruhi pelaksanaan koordinasi pembangunan desa antara lain kondisi ekonomi, struktur kelembagaan, faktor demografi, faktor politik dan sosial budaya, adat atau norma-norma dalam masyarakat, ketentuan perundang-undangan, etika dan pendidikan, serta faktor lainnya.

Hasil-hasil yang dicapai sebagaimana penulis maksudkan adalah hasil pembangunan dalam bentuk fisik dan non fisik yang meliputi bidang sarana dan prasarana serta pembangunan mental masyarakat.

Selanjutnya, unit-unit analisis yang berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan uraian pada latar masalah di atas, maka dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar : Kerangka Konseptual

Selanjutnya untuk memudahkan suatu pengertian maka setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk batasan pengertian yang tertentu agar memudahkan di dalam pengukurannya.

Adapun batas istilah yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Perencanaan

Perencanaan adalah proses pengungkapan gagasan atau pendapat yang disajikan dalam bentuk kertas kerja/desain ataupun lisan baik dalam rapat maupun pada tempat lain.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah keaktifan pemerintah wilayah beserta instansi vertikal, dinas daerah, kepala desa/lurah untuk membangun desa, yang diberikan dalam bentuk pemikiran materi/dana, waktu dan keterampilan.

Sedangkan pembangunan adalah objek pelengkap dari pelaksanaan koordinasi. Adapun indikator pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Merencanakan
- 2) Melaksanakan.

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembangunan desa baik fisik maupun non fisik.

E. Metode Penelitian

1. Desain dan Tipe Penelitian

Desain penelitian yang digunakan penulis untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi pembangunan desa di Kecamatan Sahu, adalah survey yaitu penelitian yang ditujukan pada bagian individu atau kelompok yang jumlahnya relatif besar. Selanjutnya data dikumpulkan untuk membahas permasalahan yang ada dan proses analisis serta penyusunan laporan.

Berkaitan dengan dasar penelitian tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk melihat dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan koordinasi pembangunan desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara..

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini, metode deskripsi tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya. Penemuan gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha untuk mengemukakan satu dengan yang lain di dalam aspek yang diselidiki.

Jadi metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang meneliti suatu objek yang ada pada sekarang dengan mengamati dan berinteraksi langsung dengan objek penelitian.

2. Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan yang kaitannya dengan literatur sebagai bahan penunjang dalam menganalisa data yang didapat dari lapangan

- b. Penelitian lapangan atau penelitian kancah (Field Research) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mempelajari dan terjun langsung ke objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data antara lain dengan :

- a. Wawancara; yaitu mengadakan wawancara terprogram dengan responden untuk mendapatkan informasi yang obyektif.
- b. Observasi mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi atau objek penelitian.
- c. Koesioner yaitu peneliti mengedarkan atau memberikan daftar pertanyaan kepada responden.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Penelitian laporan akhir yang dilakukan mengambil lokasi di Kecamatan Sahu, Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara dengan waktu penelitian selama \pm 6 bulan.

2. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari unit analisa yang cirinya akan diduga. Dengan demikian penulis menentukan populasi seluruh aparat pemerintah, instansi vertikal, dinas daerah dan tokoh masyarakat yang terdapat di Kecamatan Sahu Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Barat yang berjumlah sekitar 357 orang.

3. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel secara purposive sampling, yakni menentukan atau menunjuk langsung responden yang akan dipilih berdasarkan jabatan atau partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan. Mengingat besarnya populasi yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang senantiasa didasarkan pada tujuan penelitian. Selain itu responden yang dipilih menjadi sampel untuk membatasi penentuan populasi yang ada di daerah ini, adalah kepala wilayah kecamatan/sekretaris kecamatan, kepala urusan, kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat.

Selanjutnya, penetapan yang menjadi responden atau terpilih menjadi responden adalah 93 orang dari sejumlah populasi.

Adapun perincian responden yang dipilih oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.	Kepala Kecamatan	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala-kepala Urusan	4 orang
4.	Kepala Desa/Lurah	29 orang
5.	Tokoh Masyarakat	58 orang
	Jumlah	<hr/>
		93 orang

4. Analisis Data

Analisa data dilakukan selama penelitian, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui kondisi atau kenyataan yang sebenarnya dan perkiraan sementara yang dapat dikemukakan berdasarkan data yang terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian, data yang dikumpulkan secara deskriptif dengan cara informasi yang diperoleh diklasifikasikan dengan menggunakan tabel frekuensi kemudian diprosentasikan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi nantinya, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut :

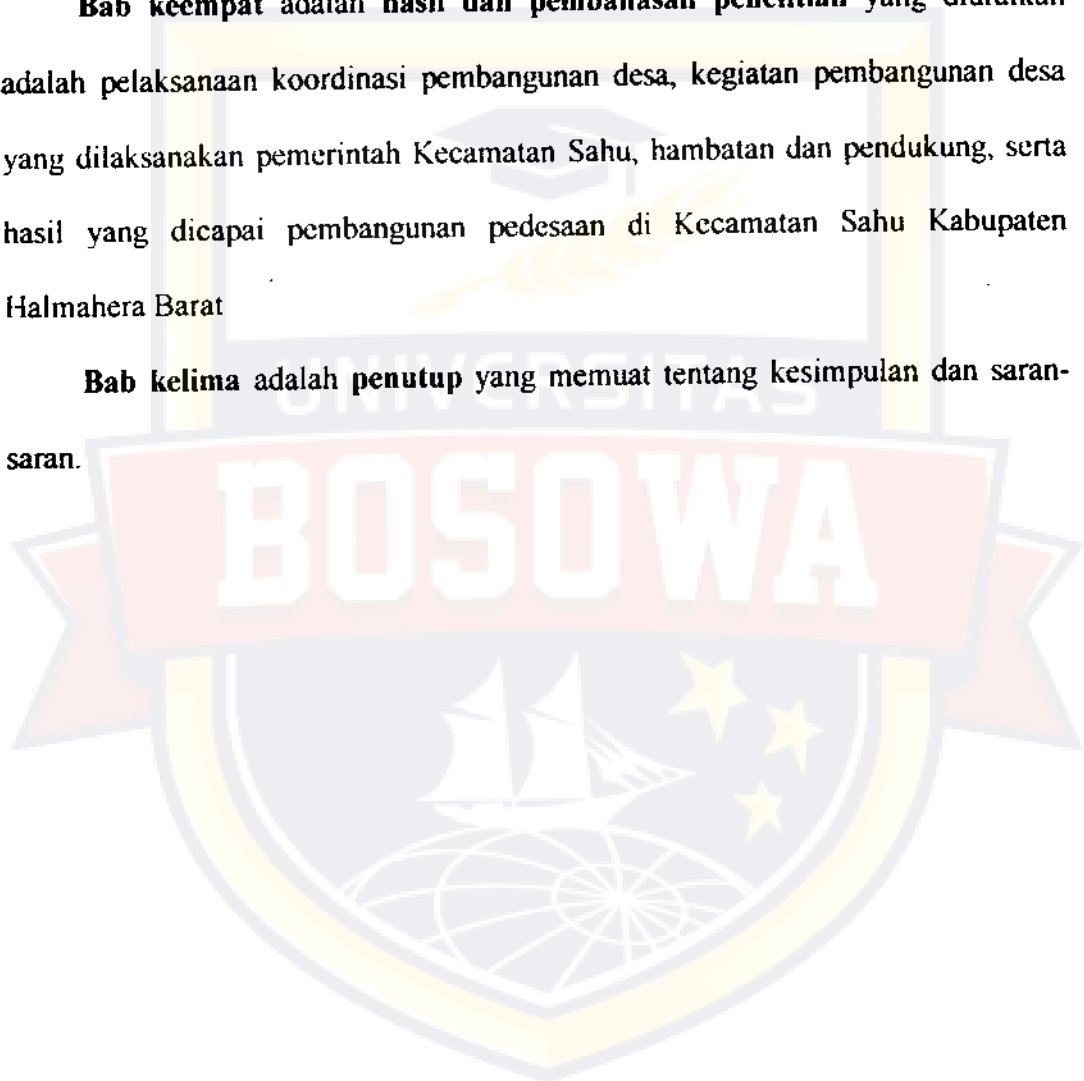
Bab pertama adalah **pendahuluan** diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah **tinjauan pustaka** diuraikan tentang pengertian koordinasi, Hakekat koordinasi sebagai upaya penciptaan efisiensi, Dasar dan prinsip serta pentingnya koordinasi dalam pembangunan, Pengertian Pembangunan desa, dan Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Bab Ketiga adalah **Gambaran Umum Lokasi Penelitian** digambarkan tentang keadaan geografi dan demografi, struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

Bab keempat adalah **hasil dan pembahasan penelitian** yang diuraikan adalah pelaksanaan koordinasi pembangunan desa, kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Sahu, hambatan dan pendukung, serta hasil yang dicapai pembangunan pedesaan di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat

Bab kelima adalah **penutup** yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koordinasi

Pada hakekatnya koordinasi berawal pada kerjasama atau Cooperatio sehingga melahirkan hubungan atau komunikasi yang merupakan fungsi yang merembes ke fungsi manajemen dan diterima secara sukarela. Atau dapat dikatakan bahwa komunikasi yang baik dapat mewujudkan koordinasi.

Mengenai koordinasi ini bukanlah kebutuhan yang baru hal ini didasarkan bahwa semua aktifitas cenderung memerlukan pengkoordinasian.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Dalam kamus "Koordinasi" sering diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya, sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur.

Secara umum koordinasi merupakan proses penarikan semua bagian organisasi, sehingga pengambilan kebutuhan, tugas-tugas, kegiatan-kegiatan dilakukan orang-orang dan unit-unit terarah pada pencapaian tujuan secara optimal.

Sedangkan, Mc. Forland seperti yang dikutip oleh Soewarno Handayaniingrat. (1981 : 88) memberi defenisi koordinasi sebagai berikut :

"Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pada usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama".

Dengan demikian koordinasi mengacu pada pengertian yang jelas, yaitu usaha yang teratur untuk pencapaian tujuan bersama dengan dikendalikan oleh pimpinan dari upaya mengusahakan agar semua kegiatan dapat selaras dan anggotanya dapat bekerja sama dengan baik, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan efisien.

Untuk lebih mendalami pengertian koordinasi tersebut, dapat dikumpulkan beberapa pendapat. Hasilnya A.E Been dikutip oleh Sutarto (1993 : 141) sebagai berikut .

"Koordinasi suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi serta penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama"

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh A.E. Benn, dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan tidak terlepas dari peran seseorang pimpinan, organisasi dan administrasi dalam kesatuan tindakan berkelompok untuk tujuan bersama.

Secara kongkrit Robert Livengstone mengemukakan bahwa :

"Koordinasi merupakan antar hubungan berbagai faktor organisasi. Tidak sukar mengorganisasi kegiatan tunggal, tetapi untuk mengorganisasi macam-macam kegiatan di dalam ketunggalan adalah merupakan pencapaian tujuan yang sukar. Koordinasi membuat organisasi baik. Ini adalah merupakan suatu sistem keseimbangan dan kontrol, tantangan dan tanggapan, yang ada diantaranya dan diantara satuan-satuan dalam organisasi".

Dari ketiga pengertian di atas, maka koordinasi dapat dikatakan bahwa suatu tindakan atau usaha keseimbangan antar kesatuan, keselarasan sinkronisasi. Dari pengertian tersebut maka hal pokok yang perlu ditekankan adalah keselarasan dalam artian bahwa di dalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan tugas antar pejabat.

Dalam pelaksanaan suatu rencana, koordinasi pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini seperti yang dinyatakan oleh Ateng Syafruddin (1993 : 268) adalah

"Suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk mensterilkan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan".

Pengertian koordinasi tersebut di atas, bahwa koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana pada dasarnya merupakan salah satu faktor atau aspek dari pengendalian yang sangat penting bagi keperluan korelasi pelaksanaan operasional, sehingga tujuan dan arah tidak menyimpang dari rencana.

Dalam bidang pemerintahan, koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada unit-unit kerja yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Unit-unit kerja akan mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Begitu pentingnya koordinasi tersebut, sehingga pemerintah telah menyusun satu rumusan tentang koordinasi dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah, di mana pada pasal 1 dinyatakan bahwa

"Koordinasi adalah upaya yang dilakukan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keseluruhan dan keterpaduan baik pelaksanaan maupun perencanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal dan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya".

Dalam PP No_ 6 Tahun 1988 tentang rumusan koordinasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa semua kegiatan pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan Dinas daerah harus sepengetahuan kepala wilayah termasuk Kepala Kecamatan. Dalam manajemen pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan adanya koordinasi yang mantap dimana koordinasi berfungsi menjamin mekanisme kerja, mengarahkan dan menyatukan dari unit-unit kerja pemerintahan. Untuk menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan tersebut, kepala wilayah mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan pembangunan di wilayahnya.

B. Hakekat Koordinasi Sebagai Upaya Penciptaan Efisiensi

Dalam penyelenggaraan setiap kegiatan suatu organisasi menuju sasaran dan tujuan unsur pengendalian sebagai alat untuk menjamin kelangsungan kegiatan mutlak diperlukan. Pengendalian yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan untuk menjamin persesuaian kerja dan rencana, program pemerintah dan

ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau terdapatnya yaitu penyimpangan-penyimpangan.

Salah satu aspek pengendalian yang sangat penting, adanya koordinasi pelaksanaan suatu rencana. Koordinasi dalam pelaksanaan merupakan proses pengendalian yang dapat menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang mana mempunyai kegunaan bagi pimpinan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Hal ini diupayakan karena sering apa yang sebelumnya dipersiapkan atau direncanakan biasanya tidak sesuai dengan perkembangannya. Jadi dengan demikian aspek pengendalian merupakan pegangan dan alat kontrol.

Koordinasi adalah asas umum dalam semua organisasi atau koordinasi merupakan asas pokok organisasi sebab tanpa koordinasi dalam organisasi sudah pasti tujuan tidak akan tercapai. Untuk memberikan gambaran betapa pentingnya tujuan koordinasi ini, maka perlu kirannya dikemukakan apabila misalnya tidak ada koordinasi dalam suatu organisasi. Menurut The Liang Gie (1970 : 91) dalam bukunya "Administrasi Perkantoran Modern" dinyatakan sebagai berikut

Kosong atau kurangnya koordinasi dalam suatu organisasi akan terlihat dari adanya gejala-gejala sebagai berikut :

- a. Petugas atau satuan-satuan organisasi berselisih pendapat menurut suatu bidang kerja atau wewenang yang masing-masing menganggap termasuk dalam lingkungan tugasnya. Dalam hal ini sering sekali terjadi kekembaran dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang memboroskan tenaga, waktu dan material.
- b. Petugas-petugas atau satuan-satuan organisasi saling melemparkan suatu tanggung jawab kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Pengingkaran

tanggung biasanya mengakibatkan adanya kekosongan tindakan yang semestinya dijalankan.

- c. Pencapaian tujuan organisasi tidak berjalan secara lancar karena suasana organisasi terasa serba kacau, para petugas nampak serba ragu dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan ternyata serba salah saling berbenturan atau bahkan hasil pekerja yang satu sering dihapuskan oleh pekerjaan yang lain tanpa disadari.

Sebaliknya apabila dalam suatu organisasi dilakukan koordinasi dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Manfaat yang dimaksudkan sebagaimana yang dilontarkan oleh Sutarto (: 92) sebagai berikut :

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada pada organisasi.
2. Dengan koordinasi dapat atau suatu pendapat bahwa atau jabatannya merupakan yang paling penting. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara satuan organisasi atau antar pejabat.
4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya rebutan fasilitas.
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama.
6. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pekerjaan suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
7. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
8. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran antara pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama diantara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
9. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya.

10. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
11. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.
12. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar pejabat.
13. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan pendapat antar pejabat.

Selain itu hakikat koordinasi erat kaitannya dengan kerjasama (Cooperation) sebab munculnya koordinasi berawal pada cooperation atau kerjasama. Dengan terjadi kontak atau hubungan (komunikasi) wadah koordinasi. Koordinasi diadakan melalui wadah ini apabila pihak-pihak bersangkutan menyadari pentingnya koordinasi. Bila di dalamnya terjalin kerjasama yang baik.

Di samping itu, dalam mengadakan koordinasi sangat ditunjang juga oleh munculnya dorongan terhadap koordinasi. Dalam setiap usaha koordinasi harus terselenggara dengan dilandasi kesadaran yang tinggi dari masing-masing pihak untuk berkoordinasi dengan sewajarnya. Dengan demikian bila semua pihak dapat bekerjasama, koordinasi dengan mudah dapat dijalin.

Terjalannya kelompok kerjasama ini akan berakibat adanya motivasi dari anggotanya merasa suatu kebersamaan dan adanya motivasi untuk melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Juga dengan kerjasama ini dapat mengadakan komunikasi antar pribadi yang lebih efektif, memudahkan tercapainya koordinasi yang diharapkan. Hal lain bahwa dengan kerjasama ini, dapat menimbulkan persahabatan yang kuat, dan menimbulkan kepuasan terhadap kerja beserta hasilnya serta mampu meningkatkan produktivitas kerja.

Koordinasi pada umumnya dilakukan secara sukarela pada setiap kegiatan, agar apa yang diharapkan dapat terwujud, maka hendaknya pemimpin lebih mengetahui dengan tepat situasi dan kondisinya. Selama kegiatan berjalan pemimpin harus juga selalu mengecek kepada orang-orangnya apakah keserasian telah terjalin atau berkembang. Dengan demikian petunjuk sederhana dan rangsangan dapat mendorong semua pihak untuk berkoordinasi. Selain itu, pemimpin mengetahui dengan tepat pula cara untuk menerapkan koordinasi terhadap bawahannya sehingga tercipta koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik adalah adanya kerjasama yang antar unit dan sub unit dengan unit atau sub unit lainnya dengan mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerjasama terhadap unit lainnya sera dapat menjalin penyesuaian dengan waktu kerjasama antara unit dan sub unitnya. Penetapan waktu yang tepat adalah sangat vital dan sangat menentukan dalam mengadakan koordinasi tersebut.

C. Dasar dan Prinsip Serta Pentingnya Koordinasi Dalam Pembangunan

Dalam pelaksanaan koordinasi berdasarkan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dinyatakan bahwa Kepala Wilayah mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban koordinasi dengan demikian sehubungan dengan kedudukannya yang ditentukan dalam Pasal 80 bahwa :

“Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang”.

Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal begitu juga antara Instansi Vertikal dengan pemerintahan daerah. Kepala Wilayah harus selalu memperhatikan dan tidak boleh bertentangan ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya maka instansi-instansi vertikal dan Dinas Daerah (otonom) wajib melaporkan segala kegiatan, memberikan keterangan yang diminta dan mematuhi petunjuk-petunjuk umum, yang diberikan oleh kepala wilayah.

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Kecamatan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kekuatan semua Instansi Vertikal dan Dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna dapat yang sebesar-besarnya. Dengan demikian itu dapat dirasakan bagaimana pentingnya koordinasi.

Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu, karena itu maka koordinasi itu adalah memberikan sumbangan (kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara spesialisasi. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik. Oleh karena itu koordinasi menentukan atau mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada kepemimpinan.

Selanjutnya, bahwa koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal di dalam organisasi itu, artinya unsur pengendalian personal dalam koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan tetapi harus diperhatikan pekerjaannya dan merasa senang bila mendapat penghargaan dari hasil kerjanya sebab kalau terjadi sesuatu kekeliruan yang biasanya selalu disalahkan ialah bawahannya, padahal seharusnya tanggung jawab pemimpin yang kurang mengadakan koordinasi. Padahal koordinasi maupun organisasi non pemerintahan maupun organisasi pemerintah sangat diperlukan dalam menjamin mekanisme kerja, sehingga dengan demikian koordinasi mempunyai kedudukan penting dalam pengendalian setiap organisasi.

D. Pengertian Pembangunan Desa

Pengertian pembangunan secara etimologik istilah pembangunan berasal dari kata “Bangun”, diberi awalan “pem” dan akhiran “an” gunanya untuk menunjukkan perihal membangun. Sedangkan ditinjau dari ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dunia dengan sejalan konsep pertumbuhan, rekonstruksi, weterisasi perubahan sosial, pembaharuan dan lain-lain- Dengan demikian bahwa pembangunan itu tiada lain adalah suatu usaha perubahan untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu atau dapat juga dikatakan, bahwa pembangunan adalah perubahan-perubahan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Selain pengertian pembangunan secara etimologi, penulis berusaha mengumpulkan beberapa pendapat antara lain :

Bintoro (1974 : 222) memberikan defenisi pembangunan sebagai berikut :

“Pembangunan merupakan suatu proses pembangunan yang kontinyu yang terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”.

Sejalan dengan itu Siagian (1988 : 2) memberikan defenisi sebagai berikut :

“Pembangunan didefenisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa”.

Dari kedua defenisi pembangunan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan serta pertumbuhan dan perubahan yang berencana secara berkesinambungan.

Bintoro, Tjokroamijoyo. (1982 : 222) menyatakan :

“Pembangunan pada dasarnya adalah usaha manusia dan untuk memahami pembangunan tersebut dibutuhkan usaha-usaha yang terpadu dari seluruh sistem ilmu pengetahuan baik fisik, maupun biologis, sosial maupun tentang manusia”.

Jadi berkaitan dengan pendapat tersebut, pada dasarnya tepatlah jika dikatakan sesungguhnya yang difokuskan pembangunan itu adalah perubahan kepada modernisasi. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan besar-besaran suatu masyarakat atau bangsa dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik yang dapat dikonsepsikan sebagai suatu kebutuhan hidup (pertumbuhan ekonomi), kebebasan memilih atau perubahan sosial atau harga diri serta nilai etik.

Sedangkan Coralie Bryant dan Louise White (*Managing Development In The Third World*, 1982) yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha (1990 : 16) memberikan definisi pembangunan sebagai berikut :

“Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan rakyat (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan/semangat untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*)”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan mengandung unsur-unsur yaitu kemampuan, pertumbuhan, kesempatan, kebebasan dan kekuasaan untuk membuat. Selain itu adalah kemandirian yang dilakukan secara bertahap.

Setelah penulis merangkai beberapa batasan pengertian dasar tentang pembangunan, selanjutnya penulis akan menelaah lebih khusus mengenai pembangunan desa.

Bila dilihat dari segi istilah sebenarnya pembangunan desa pengertiannya identik dengan istilah pembangunan masyarakat desa. Di dalam bahasa Inggris pembangunan desa ini sering disebut dengan istilah "Community Development" yaitu pembangunan masyarakat. Pengertian pembangunan pedesaan itu akan terus berkembang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek serta kebutuhan-kebutuhan yang dirasa perlu diberikan pada pengertian itu sendiri. Hal itu membuktikan semenjak lahirnya istilah pembangunan masyarakat desa bukanlah merupakan pengertian yang hanya terdapat di negara kita saja, akan tetapi boleh dikatakan mempunyai kedudukan internasional dan mempunyai latar belakang historis, sosial ekonomi, kultural dan spritual. Walaupun demikian bahasa yang berbeda akan tetapi mempunyai makna dan arti yang sama. Pembangunan Desa yang telah populer di Indonesia, dimana dalam istilah desa sudah tercakup pengertian masyarakatnya. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan walaupun sering juga digunakan modernisasi desa tetapi itu adalah identik dan pengertiannya sama.

Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian desa kita akan menyimak beberapa ahli pendapat seperti yang dikemukakan TR. Butten (1979) dalam Buku Pembangunan Masyarakat yang dikutip oleh I. Nyoman Baratha (1982 : 67) menyatakan bahwa :

“Pembangunan adalah suatu proses ketika anggota-anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka”.

Hal ini sejalan juga dengan catatan resmi dalam Pola Gerak Operasional Pembangunan Desa (SK Mendagri No. 42 Tahun 1969 : 72) dinyatakan bahwa :

“Pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus secara sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh”.

Selain itu, I Nyoman Baratha (1982 : 65) memberikan definisi pembangunan desa yaitu :

“Pembangunan desa adalah masyarakat sebagai suatu proses, metode, program, kelembagaan-dan gerakan yang mencakup keikutsertaan masyarakat sebagai basis yang ikut menggalang masalah-masalah yang dihadapi bersama melatih dan mendidik masyarakat dalam bersama dan mengaktifkan kelembagaan serta menyediakan fasilitas untuk transfer teknologi masyarakat”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian pembangunan masyarakat desa yaitu pembangunan masyarakat desa merupakan proses aktivitas yang sengaja dilakukan dan merupakan proses kebersamaan dari warga masyarakat yang lebih menekankan swadaya dan peningkatan kemampuan masyarakatnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan atau daerah tertentu.

E. Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa perhatian sebesar-besarnya sangat penting diupayakan kepada peningkatan pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan tempat yang strategis, karena desa menjadi basis landasan pembangunan nasional dengan karakteristik garis masih dominan. Pembangunan desa bersifat multi sektoral menyangkut semua kehidupan masyarakat hingga dengan demikian tidaklah berdiri-sendiri tetapi merupakan kesatuan dengan pembangunan nasional di daerah.

Dengan sifat multi sektoral yang melekat pada pembangunan desa mengharuskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dalam segi perencanaan dan terpadu lalu dalam-segi pelaksanaan, sehingga informasi daripada pembangunan tersebut dapat diraih, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana tujuan pembangunan desa tersebut.

Tujuan organisasi desa tidak terlepas dari tujuan pembangunan secara nasional yang harus dilakukan terpadu, terarah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan pembangunan desa adalah sebagai pengamalan Pancasila, dilaksanakan secara laras agar benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah, sedangkan keseluruhan pembangunan desa merupakan satu sebagai satu kesatuan demi terbinanya Indonesia sebagai salah

satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam mewujudkan wawasan nusantara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Selanjutnya juga dapat dikatakan bahwa sesuai dengan sifatnya pembangunan desa itu sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pedesaan, karena sebahagian besar adalah tinggal dan berusaha di desa yang mana merupakan subjek pembangunan. Masyarakat yang dianggap berfungsi sebagai subjek pembangunan adalah yang mampu berkembang secara mandiri. Secara konseptual masyarakat mandiri ialah masyarakat yang mampu mengendalikan atau mempengaruhi masa depannya sendiri. Konsep ini dapat dioperasionalisasikan menjadi beberapa indikator yaitu kemampuan masyarakat untuk mengusahakan, memelihara segenap sumber, asset dan sarana yang ada baik yang berbentuk fisik. Indikator lainnya adalah kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dalam keadaan mundur untuk mengembangkan atau meningkatkan sumber, asset atau peralatan yang ada untuk memberi respon positif terhadap setiap perubahan sosial yang berlangsung.

Dari seluruh aspirasi nasional bangsa Indonesia yang menjadi dasar segala kebijaksanaan di dalam pengambilan langkah di bidang pembangunan dalam hal ini pembangunan pedesaan dengan mengikutsertakan pola kebijaksanaannya.

Berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan desa maka inisiatif masyarakat yang memegang peranan penting sebagai kunci utama, dan posisi pemerintah hanyalah sebagai pembimbing, mengawasi serta mendorong masyarakat untuk memelihara, menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa

swadaya serta inisiatif masyarakat dengan jalan memberikan bantuan-bantuan dan lain-lain.

Dengan upaya demikian itu akan memberikan manfaat dan kegunaan khususnya bagi masyarakat yang bersangkutan. Manfaat tersebut yaitu masyarakat desa merasa ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan dan dapat diharapkan pula terdapatnya penumbuhan dan pengembangan kader-kader pembangunan desa. Selain itu dapat ditambahkan pengalaman-pengalaman masyarakat untuk lebih mengenal kebutuhan hidup serta bisa memanfaatkan kondisi alamnya untuk kepentingan sendiri agar terpelihara kerjasama diantara anggota masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dan pemerintah dan antara badan atau lembaga pemerintah itu sendiri yang mana dibarengi dengan penyusunan perencanaan dan pelaksanaannya. Mengenai perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin suksesnya pembangunan desa karena apabila berdasar dari segi pemenuhan kebutuhan dapat dikatakan bahwa tujuan pokok pembangunan tidak lain adalah menemukan, menciptakan dengan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dengan bahan baku yang tersedia.

Hal lain dapat dikatakan bahwa dengan bidang perencanaan pembangunan desa yang terarah dan besar-benar menjamin adanya sistematisasi urutan kegiatan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa seperti halnya dalam rangka pengamanan pembiayaan pembangunan (bantuan subsidi pemerintah dan lain-lain), perencanaan cukup memberikan andil yang besar. Karena dengan perencanaan tersebut maka tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Itulah salah satu aspek yang

mana merupakan hal yang penting dalam bidang perencanaan pembangunan desa yang utama dan menyusunnya secara cermat, teliti serta terarah. Jadi dengan demikian perencanaan yang mantap dalam pembangunan desa menjadi dasar menuju titik tujuan pembangunan yang selama ini diinginkan.

Selain perencanaan, yang tak kurang pentingnya adalah pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Dalam pelaksanaan atau pengadaan proyek, seperti yang telah digariskan dalam perencanaan atau planning dan sistematikan penggarapan akan cukup memberikan jaminan keberhasilan suatu proyek itu sendiri.

Untuk itu perlunya diadakan pencatatan serta dipadukan dengan pengalaman yang telah didapatkan pelaksanaan sebelumnya serta dapat pula diadakan evaluasi dari kegiatan secara kontinyu yang mana sangat bermanfaat bagi penyusunan proyek-proyek pada tahap selanjutnya.

Pelaksanaan program pembangunan desa sangat dititikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam Kepres Republik Indonesia No. 319 dinyatakan bahwa berhasil tidaknya repelita ini akan tergantung dari banyaknya tanggapan, pengertian kesadaran dan partisipasi rakyat Indonesia dalam menyambut tantangan pembangunan ini secara positif guna meratakan jalan bagi anak cucu dan generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian faktor partisipasi masyarakat turut menentukan sukses tidaknya usaha pembangunan disamping sebagai pemerintah yang memelopori.

Walaupun demikian masih banyak masyarakat dan pihak yang seharusnya memelopori pembangunan malah menunjukkan mental yang sukar diajar membangun. Hal ini tepat pada yang sering dikatakan orang, bahwa masalah partisipasi utama kepada masyarakat dalam usaha pembangunan, hal utama adalah merubah dan merombak sikap mental mereka serta menyadarkannya bahwa pembangunan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian itu, untuk berlangsungnya suatu proses pembangunan sangat diperlukan syarat yaitu harus ada kemauan keras serta kemauan untuk dapat memanfaatkan setiap kesempatan bagi keperluan pembangunan. Masyarakat harus aktif dan ikut berpartisipasi memecahkan masalah dan memiliki sikap terbuka baik pikiran maupun usaha-usaha baru. Selain itu dibutuhkan kelompok kreatif atau moril pemimpin yang kreatif serta segalanya yang berpikiran lebih kritis.

Hal lain, dalam pelaksanaan pembangunan, sangat ditunjang dengan tersedianya sumber daya atau modal untuk proses pembangunan yang bersifat materiil. Jadi dengan demikian partisipasi atau keikutsertaan kelompok masyarakat dapat dimulai di lingkungan masyarakat dan dapat memberikan pengaruh atau prakarsa sebagai sumbangsi terhadap negara dan masyarakat pada umumnya. Dan ditunjang oleh pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan yang mampu menjadi pendorong atau motor penggerak terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap sektor pembangunan dengan ditunjang oleh dana yang cukup.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Sahu merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Secara umum Kecamatan Sahu dengan luas wilayah $\pm 14.558 \text{ km}^2$ terdiri dari :

- Ladang : $\pm 675 \text{ Ha}$
- kebun : $\pm 7.725 \text{ Ha}$
- Sawah/Rawa : $\pm 220 \text{ Ha}$
- Hutan : $\pm 5.940 \text{ Ha}$

Daerah pemerintahan dibatasi dengan :

- Sebelah Barat : dengan Laut Maluku
- Sebelah Timur : dengan Kecamatan Kao
- Sebelah Utara : dengan Kecamatan Ibu
- Sebelah Selatan : dengan Kecamatan Jailolo

B. KEADAAN DEMOGRAFI

Secara Administratif Sahu dibagi dalam 29 desa dan 1 (satu) anak desa yaitu dusun Lako Akediri anak desa dari Lako Akelomo, dan nama desa sesuai tabel terlampir.

- Penduduk Kecamatan Sahu seluruh 14.901 jiwa
Terdiri dari : Laki-laki = 7732
Perempuan = 8004
Jumlah kepala keluarga 3140 kk

Jika diperhatikan jumlah penduduk setiap desa maka dapat dikatakan bahwa penyebaran pendudukan dalam wilayah Kecamatan Sahu tidak merata.

Kedadaan ini disebabkan oleh adanya alasan-alasan seperti jenis atau bentuk pekerjaan yang menuntut seseorang atau sekelompok orang untuk berpindah tempat tinggal dari suatu tempat ke tempat lain untuk bekerja.

Untuk melihat distribusi penduduk dalam wilayah Kecamatan Sahu setiap desa menurut golongan umur dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran Penduduk Kecamatan Sahu Dirinci Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

NO	Nama Desa	Jumlah				Golongan Umur			
		KK	Jiwa	L	P	0-6	7-13	14-16	17 dst
1	Susupu	402	1826	869	957	202	245	247	1132
2	Lako Akelamo	150	648	302	346	77	88	77	406
3	Tacim	131	413	262	151	48	39	43	283
4	Taruba	54	227	116	111	16	21	27	163
5	Balision	230	1040	847	553	97	113	120	710
6	Goloo	86	396	190	266	36	61	37	262
7	Idam Gamlamo	104	508	269	239	46	56	677	339
8	Gamomeng	101	450	210	240	53	67	40	290
9	Akelamo	211	1042	479	563	66	188	199	589
10	Taraudu Kusu	35	169	83	86	18	21	25	105
11	Awer	116	546	283	281	42	61	92	359
12	Aketola	61	310	180	130	39	73	36	162
13	Tibobo	72	445	203	424	64	91	48	242
14	Taraudu	73	162	151	271	46	47	53	216
15	Loce	72	413	194	219	37	61	63	252
16	Tacici	42	205	107	98	13	24	34	134
17	Worat-Worat	84	377	183	149	29	49	51	248
18	Todahe	139	782	387	395	81	105	217	379
19	Peot	113	592	268	324	49	67	60	398
20	Hoku-Huk Gam	53	278	132	146	31	21	51	175
21	Gamnyial	60	369	180	189	35	57	61	216
22	Campaka	33	174	85	89	12	22	34	107
23	Ngaon	40	212	117	95	8	27	23	154
24	Gamsungi	45	217	108	109	19	38	34	126
25	Taba Campaka	86	397	191	206	25	61	66	245
26	Goal	77	393	182	211	47	58	51	237
27	Golago Kusuma	155	563	280	283	43	47	53	420
28	Sasur	189	1114	561	553	117	201	183	613
29	Goro-Goro	126	633	313	320	73	97	91	372
Jumlah		3140	14901	7732	8004	1469	2106	2183	9334

Sumber : Kantor Kecamatan Sahu, Nopember 2003

C. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sahu Tengah pada umumnya sangat kompleks/bervariasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan golongan kelas atau status masyarakat dalam kehidupan. Stratifikasi yang terjadi pada masyarakat kecamatan sangat menonjol atau dirasakan oleh masyarakat setempat.

Mata pencaharian yang paling besar didominasi oleh penduduk yang berkecimpung pada pertanian dan sebagian lagi wiraswasta serta pegawai negeri sipil, ABRI, Polisi, dan nelayan. Jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat adalah sesuai kebutuhan kerja yang diminati masyarakat atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang dihubungkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

D. Keadaan Sosial Budaya dan Agama

Dengan melihat perkembangan dan pertumbuhan pembangunan, baik secara material maupun spiritual telah mengalami kemajuan. Hal ini dapat pula dilihat pada desa-desa yang berada di pelosok desa yang membawa perubahan yang menuju pada hal-hal yang positif. Walaupun di desa-desa mengalami hambatan-hambatan, antara lain transportasi, informasi dan sebagainya.

Perubahan-perubahan yang sangat menonjol terjadi pada masyarakat desa Sahu yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh masyarakat melalui

berbagai macam jalur pendidikan dan media informasi. Karena dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan akan membawa pengaruh terhadap tingkat kehidupan masyarakat, baik material maupun spiritual. Terjadi perubahan pada diri individu akan membawa pengaruh terhadap perubahan lingkungan maupun terhadap diri sendiri. Untuk mengetahui keadaan tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Sahu dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sahu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar/Iftidayah	2.286
2	SMP/Tsanawiah	1.665
3	SMU/Aliah	911
4	Sarjana	231
Jumlah		5.093

Sumber : Kantor Kecamatan Sahu, Nopember 2003

Dari data tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Sahu sebagian besar sudah memperoleh pendidikan formal. Hal ini dimungkinkan dengan adanya dukungan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah cukup memadai dan tingkat kesadaran masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan melalui pendidikan formal.

Untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Sahu dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Sahu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	6
2	Sekolah Dasar/Iftidayah	26
3	SMP/Tsanawiah	4
4	SMU/Aliah	2
5	Perguruan Tinggi	-

Sumber : Kantor Kecamatan Sahu, Nopember 2003

Dalam mewujudkan suatu perubahan menuju dalam keadaan yang lebih baik, tentu tidak terlepas dari keyakinan dan agama yang dianut oleh anggota masyarakat. Hal ini sangat menentukan bagi dinamika kehidupan antara umat beragama di Kecamatan Sahu. Berikut ini keadaan pemeluk agama dalam wilayah Kecamatan Sahu tahun 2003.

Tabel 4. Keadaan Pemeluk Agama Dalam Wilayah Kecamatan Sahu

No.	A g a m a	Jumlah Pemeluk
1	I s l a m	4.476
2	Katolik	10.403
3	Protestan	244
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	15.123

Sumber : Kantor Kecamatan Sahu, Nopember 2003

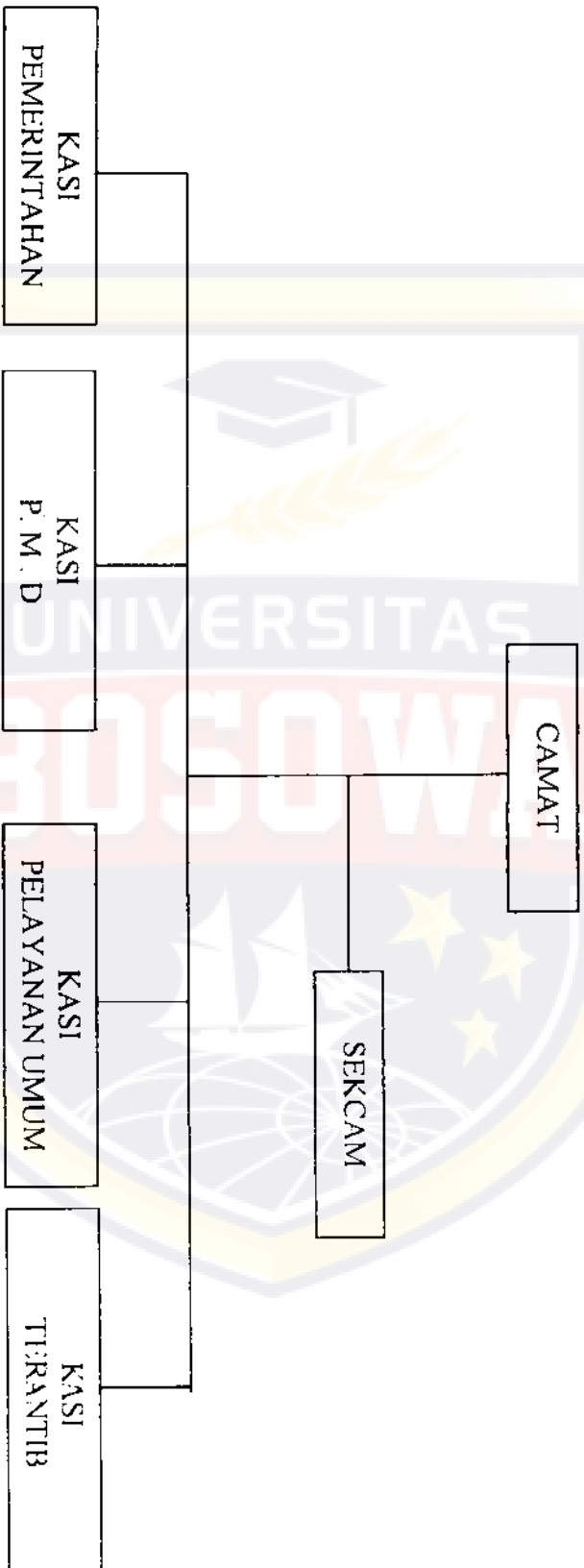
E D. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Sahu

Struktur organisasi pemerintahan di Kantor Kecamatan Sahu merupakan salah satu potensi dimana segala sesuatu yang menyangkut soal kemasyarakatan, pemerintah maupun pembangunan menjadi ruang lingkup tugas yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan karena instansi yang merupakan hal yang sangat penting sebagai pemrakarsa pembangunan di daerah (Wilayah Kecamatan)

Begitu pentingnya Wilayah Kecamatan maka wilayah kecamatan sangat memerlukan pemimpin atau administrator yang tidak hanya mampu mengkoordinasikan tugas-tugas pembangunan yang masuk kewilayahannya, tetapi yang mampu membina dan menggerakkan masyarakat dan instansi vertikal serta dinas daerah kepada tujuan pembangunan berdasarkan hal di atas, organisasi pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan daerah sehingga harus jelas strukturnya dalam arti hubungan kerja antara vertikal dengan dinas daerah yang ada di Kecamatan

Berikut ini struktur organisasi Kantor Kecamatan Sahu berdasarkan peraturan daerah No. 21/2001.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT SAHU
PERDA NO. 12 /2001**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi antar instansi di Kecamatan Sahu

Dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini pemerintah menggalakkan dan berorientasi pada pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di pedesaan. Pembangunan pedesaan dilaksanakan dalam rangka menyukseskan pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang sasaran utamanya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri.

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan pada umumnya bergantung beberapa faktor seperti di antaranya tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah; di antara faktor-faktor tersebut sebagaimana kenyataan di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, faktor pemerintahlah yang mempunyai kedudukan yang utama. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintahlah yang berperan menggali, menggerakkan dan mengkombinasikan faktor-faktor tersebut. Atau dapat disimpulkan, bahwa pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan kebijaksanaan untuk melaksanakannya.

Seperti halnya pelaksanaan pembangunan desa yang meliputi berbagai aparat departemen pemerintah dan masyarakat, perlu adanya koordinasi yang sebaik-baiknya dari tingkat pusat sebagai perumus kebijaksanaan umum, di tingkat

propinsi sebagai perumus kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, kabupaten sebagai perumus kebijaksanaan pelaksanaan, sampai pada kecamatan dan desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan, agar keseluruhan program tersebut dapat saling kait-mengait, serta saling menunjang, sehingga dengan demikian dapat dicapai manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai kegiatan pembangunan yang ada di desa/kelurahan. Agar terselenggaranya koordinasi yang baik dan diperlukan mekanisme kerja antara berbagai aparat mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang dikendalikan oleh Kepala Kecamatan

Untuk tingkat kecamatan, pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang dibantu oleh aparat wakil instansi vertikal, Dinas Daerah tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan. Camat selaku Kepala Kecamatan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan. Untuk itu pemerintah telah memberikan wewenang kepada Kepala Wilayah Kecamatan untuk mengendalikan pembangunan melalui koordinasi. Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintahan adalah penguasa tunggal di bidang pemerintah dalam wilayahnya dalam arti mempunyai pemerintahan, yang siap mengkoordinasikan pembangunan dari membina kehidupan masyarakat di segala bidang atau Kepala Wilayah adalah sebagai administrator pembangunan, Administrator pemerintahan dan administrator kemasyarakatan.

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik pelaksanaan maupun perencanaan tugas serta kekuatan semua instansi-instansi vertikal, dan dinas daerah agar tercapai hasil

guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Selain itu melalui koordinasi akan diperoleh cakrawala yang lebih luas bukan saja tentang pentingnya fungsi dan tugas suatu instansi vertikal, tetapi juga akan diperoleh tentang gambaran dan hubungan pelaksanaan tugas tertentu dengan pelaksanaan bidang lain secara timbal balik dalam kaitannya dengan tercapainya keseluruhan bidang tugas sebagai tujuan akhir secara optimal. Dan yang lebih penting lagi bahwa dengan koordinasi yang baik khususnya dalam organisasi pemerintahan dapat mencegah titik perselisihan dan petugas/pejabat lebih terfokus pada arah dan tujuan yang lebih mementingkan kebersamaan serta dapat menghindari kesemrawutan kegiatan. Pelaksanaan koordinasi yang baik ini, juga dapat menjadikan pejabat atau petugas pemerintah lebih mempunyai pekerjaan yang baik dalam pelaksanaan tugas dalam menuju tujuan yang serasi dan seimbang serta penentuan waktu kegiatan disamping penyesuaian perencanaan. Dengan pelaksanaan koordinasi ini adalah untuk menjamin juga kelancaran mekanisme kerja sebagai komponen organisasi pemerintah, seperti halnya pemerintah Kecamatan. Kelancaran mekanisme kerja dalam rangka pencapaian tujuan dalam pemerintahan dengan menghindari semaksimal mungkin terjadinya perselisihan yang timbul antara sesama unit kerja dan mengusahakan kerjasama antara unit-unit kerja yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan secara efisien. Tanpa koordinasi, bagian-bagian tersebut akan kehilangan pegangan atau peranan mereka dalam organisasi pemerintah. Unit-unit kerja akan mengejar kepentingannya sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Suatu aksi yang terkoordinasi dengan baik bila kegiatan-kegiatan dari semua pihak berjalan harmonis dan saling bertalian serta terpadu menuju tujuan yang jelas. Jadi dengan demikian untuk penyelenggaraan pemerintahan, terutama di daerah atau wilayah di tingkat kecamatan, koordinasi bukan hanya kerjasama, melainkan juga antara integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaannya, yang khususnya dalam bidang pembangunan desa.

Seperti halnya daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, pemerintah Kecamatan Sahu beserta seluruh aparat dan warganya terus berbenah dan membangun daerahnya agar tidak ketinggalan dengan daerah lain atau dengan kata lain dapat sejajar dengan daerah-daerah yang telah maju. Dari pelita ke pelita, Pemerintahan Kecamatan Sahu terus meningkatkan laju pembangunan daerahnya. Upaya ini dilakukan sebagai langkah konkrit pemerintah dan rakyat dalam usaha meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan seluruh warganya, tetapi juga dalam rangka tanggung jawab dan turut serta menyukseskan pembangunan nasional secara keseluruhan. Keadaan ini disadari oleh pemerintah wilayah Kecamatan Sahu, bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan, selain sebagai tanggung jawab pemerintah setempat juga pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN), menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Usaha kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah/Wilayah Kecamatan Sahu tidak terlepas dari koordinasi dari pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab penuh pelaksanaannya terhadap instansi vertikal dan dinas daerah sebagaimana tugasnya menyelenggarakan koordinasi, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sebagaimana ciri-ciri koordinasi. Adapun ciri-ciri koordinasi yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanggung jawab dari pada koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah merupakan tugas dari pada pimpinan. Pimpinan harus juga mengadakan kerjasama (cooperation). Oleh karena itu kerjasama (cooperation) merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan dari pada koordinasi
- Adanya proses, sebab koordinasi adalah pekerjaan dari pada pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- Pengaturan secara teratur daripada usaha kelompok. Oleh karena organisasi adalah merupakan konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terdapat usaha individu yang bekerjasama, dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam

melaksanakan tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

- Konsep kesatuan tindakan. Hal ini merupakan inti dari pada koordinasi kesatuan dari pada usaha berarti pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan inilah merupakan suatu kewajiban dari pada pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik. Dengan kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai tujuan kelompok.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka jelas pelaksanaan koordinasi di Kecamatan . an Sahu , tidak terlepas dari pada ciri-ciri koordinasi itu sendiri yaitu :

1. Tanggung Jawab Pelaksanaan Koordinasi Terletak pada Pimpinan

Koordinasi merupakan tugas pimpinan yang dilaksanakan dengan mengusahakan agar semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat menjalin kerjasama dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien atau koordinasi merupakan proses jalinan bagian organisasi sehingga pengambilan keputusan, tugas-tugas, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan orang-orang dan unit-unit kerja terarah pada pencapaian tujuan secara optimal.

Usaha pelaksanaan koordinasi atau mengkoordinasikan merupakan kegiatan dan fungsi manajemen yang diupayakan terjalannya kerja sama yang selaras dan tertib yang berorientasi pada tujuan organisasi secara seksama sehingga tidak semraut, kekacauan, tumpang tindih atau terdapatnya kekosongan kerja. Karena koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi./manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari pimpinan/atasan. Hal ini didasarkan bahwa koordinasi ialah konsep dasar yang kedua disamping kepemimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan yang efektif dapat menjamin koordinasi yang baik, sebab pimpinan berperan sebagai koordinator. Jadi dengan demikian koordinasi adalah salah satu kemutlakan bagi seorang pimpinan dan senantiasa harus mempunyai pengetahuan yang aktual dan merata dari setiap fase kegiatan administrasi, yaitu perencanaan, organisasi, kegiatan (aktifitas), pembimbing dan kontrol. Selain itu untuk terselenggaranya koordinasi yang baik, maka seorang pimpinan berhak berkewajiban mengendalikan bawahannya dengan rangsangan sasaran yang tepat, sehingga menyadari kepentingan berkoordinasi dengan bagian yang lain dan dapat terjadi kerjasama agar koordinasi dapat terjalin dengan mudah. Dan seorang pimpinan harus menyadari tata cara yang berkembang dalam lingkungan untuk memudahkan mengadakan koordinasi dan kalau perlu memanfaatkan waktu yang tidak resmi untuk melakukan kontak dengan mereka menyampaikan saran dan penyempurnaan yang menunjang keberhasilan koordinasi.

Setelah koordinasi berjalan, seorang pimpinan harus selalu mengadakan pengecekan untuk mengetahui keserasian dari semua pihak dalam melaksanakan tugas koordinasi. Pengecekan ini harus dimantapkan dengan baik memerlukan tenaga sebagai penyambung informasi (penghubung untuk memperoleh informasi penting untuk kelompok serta dapat melakukan pendekatan-pendekatan untuk menjamin terselenggaranya koordinasi).

Demikian pula halnya Kepala Kecamatan selaku pimpinan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan. Untuk itu pemerintah telah memberikan wewenang kepada kepala wilayah di semua tingkatan termasuk kepada kepala wilayah kecamatan untuk mengendalikan pembangunan melalui koordinasi. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, bahwa kepala wilayah kecamatan mempunyai wewenang untuk menjalankan koordinasi dengan semua aparat pemerintah dan instansi vertikal, dinas daerah baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tercapai hasil yang semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui tanggung jawab yang dilaksanakan oleh kepala wilayah, dalam hal ini Kepala Wilayah Kecamatan Sahu, dapat disimak deskripsi jawaban atau tanggapan responden pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Tanggung Jawab Camat Kecamatan
Dalam Koordinasi Pembangunan di Kecamatan Sahu

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Baik	47	50,54
2.	Cukup Baik	35	37,63
3.	Kurang Baik	11	11,83
4.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		93	100,00

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004

Dari data pada tabel 5 terlihat bahwa penilaian responden mengenai tanggung jawab kepala Kecamatan adalah baik, ini terlihat dari sebagian besar responden dengan penyebarannya masing-masing 47 orang atau 50,54 persen responden penilaiannya "baik" dan 35 orang atau 37,63 persen responden menjawab "cukup baik". Untuk kategori jawaban "kurang baik" sebanyak 11 orang atau 11,83 persen responden dan tidak ada jawaban atau memberikan penilaian terhadap alternatif "tidak baik".

Demikian halnya dengan kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sahu, tanggung jawab seorang pimpinan sangat penting. Hal ini merupakan salah satu gambaran tentang tanggung jawab Kepala Wilayah Kecamatan Sahu yang mendapat respon positif. Suatu hal yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan koordinasi, pembangunan desa.

2. Hubungan Kerjasama Dalam Koordinasi

Dalam memelihara kelancaran jalannya pemerintahan yang baik serta mempermudah pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan khususnya pada tingkat kecamatan, maka hendaknya diciptakan iklim yang baik dan sesuai dengan program pemerintah yang telah ditetapkan serta menciptakan adanya integrasi kerja antara kepala wilayah dengan instansinya yang ada di wilayah kecamatan. Hal ini bisa berbentuk sebagai kerja sama dalam melakukan koordinasi. Karena koordinasi berawal pada kerjasama yang sifatnya sebagai kewajiban. Dengan demikian suatu organisasi dapat mencapai tujuannya apabila di dalamnya terjalin kerjasama yang harmonis. Anggota satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara positif, persepsinya juga positif sehingga terdapat kepuasan dalam menjalankan tugasnya. Dengan kerjasama dapat menciptakan motivasi para anggotanya merasa suatu kebersamaan dan adanya motivasi untuk melaksanakan tugas kelompok dengan baik dan dapat terjalin komunikasi antar pribadi yang lebih efektif. Selain itu dapat mempermudah tercapainya koordinasi yang diharapkan dan menimbulkan persahabatan yang kokoh, mampu meningkatkan produktivitas kerja dan akhirnya menimbulkan kepuasan kerja terhadap hasil yang dilakukan.

Kepala Kecamatan dalam rangka melaksanakan wewenang dan kewajibannya yaitu menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang

sebesar-besarnya. Dalam mengkoordinasikan pembangunan kegiatan-kegiatan instansi vertikal begitu juga antara instansi-instansi vertikal dengan pemerintah daerah, Kepala Kecamatan harus memperhatikan anggotanya dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi, Kepala Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kaitan dan kepentingan antara instansi baik fungsional, sektoral maupun regional
- b. Memadukan kegiatan-kegiatan atau tugas yang sejenisnya dan berkaitan
- c. Menyeleraskan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
- d. mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas-tugas instansi vertikal
- e. mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas instansi vertikal
- f. meminta keterangan pelaksanaan tugas-tugas instansi vertikal

Dengan demikian bilamana instansi berkehendak melakukan tugas, berkewajiban melaporkan segala kebijakan dan rencana kegiatan yang ditetapkan instansi atasannya kepala wilayah serta melaporkan ke instansi atasannya dan melaporkan hasil koordinasi kepada kepala wilayah atas rencana kegiatan sektoral kepada tugas kepala wilayah mengenai perkembangan pelaksanaan tugas dan keterangan-keterangan lainnya dianggap perlu.

Secara teknis penyelenggaraan, kepala instansi vertikal dikoordinasikan oleh kepala wilayah dalam arti bahwa untuk menjaga keselarasan dan

keserasian serta mencegah timbulnya duplikasi tugas, penanganan dan wewenang dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi (baik instansi vertikal maupun instansi dinas daerah), dengan itu maka kepala wilayah, kecamatan perlu menentukan kaitan-kaitan fungsional maupun teritorial agar kegiatan, kepentingan suatu instansi dan jadwal kegiatan berbagai instansi pada tempat bersamaan dan penyelenggaraan berdasarkan dari Undang-Undang yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan kerja sama dalam koordinasi, maka dapat disimak deskripsi tanggapan responden yang tersaji pada tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
Tanggapan Responden Tentang Hubungan Kerjasama Dalam Koordinasi Pembangunan di Kecamatan Sahu

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Baik	30	32,26
2.	Cukup Baik	58	62,37
3.	Kurang Baik	5	5,38
4.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		93	100,00

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004

Berdasarkan data pada tabel 6 dapat dikatakan bahwa hubungan kerjasama dalam koordinasi pembangunan desa juga dinilai cukup baik. Hal ini terbukti dari jawaban yang diberikan oleh responden yaitu 58 orang atau 62,37 persen responden menjawab "cukup baik". 30 orang atau 32,26 persen

responden yang menjawab “baik” dan 5 orang atau 5,38 persen menjawab atau memberikan penilaian “tidak baik”.

Dari gambaran di atas, nampak jelas bahwa aspek-aspek hubungan kerjasama dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan desa dianggap cukup baik. Dengan selalu berpedoman pada asas kerjasama maka tujuan yang akan dicapai akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu Kepala Wilayah, sebagai seorang pemimpin di wilayahnya hendaknya mampu menjalin hubungan dengan instansi vertikal dan dinas daerah untuk menunjang pembangunan di daerahnya.

3. Kestinambungan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Sahu

pembangunan desa ialah merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional di mana perhatian utama pemerintah merupakan manifestasi dari arah pembangunan pedesaan, sebab sumber-sumber kekayaan dan pendapatan nasional sebagian besar berasal dari daerah pedesaan, oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus benar-benar berdasarkan atas kepentingan masyarakat pedesaan.

Mengingat pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pembangunan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Dengan

demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengarahkan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan berbagai cara dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya serta perlu pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.

Mengenai pelaksanaan pembangunan desa secara berkesinambungan, oleh pihak yang instansi terkait yaitu pemerintah Kecamatan sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan beserta instansi vertikal dan dinas daerah dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7
Tanggapan Responden Tentang Kesenambungan Pelaksanaan
Pembangunan di Kecamatan Sahu

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Lancar	22	23,66
2.	Cukup lancar	61	65,59
3.	Kurang Lancar	10	10,75
4.	Tidak Lancar	-	-
Jumlah		93	100,00

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004

Pada tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa kesinambungan pembangunan desa berjalan dengan baik. Hal ini dapat disimak pada dari jawaban responden bahwa 61 orang atau 65,59 persen responden yang menyatakan "cukup lancar", dan 22 orang atau 23,66 persen responden yang menyatakan "lancar",

kemudian 10 orang atau 10,75 persen responden yang menyatakan “cukup lancar”.

Dengan demikian menilai kesinambungan pelaksanaan pembangunan desa dianggap berjalan dengan baik akibat terjadinya koordinasi. Suatu aspek yang perlu dipertahankan dan bahkan kalau perlu lebih ditingkatkan lagi guna memperlancar kegiatan pembangunan desa khususnya di Wilayah Kecamatan Sahu .

4. Usaha Kelompok Yang Teratur

pembangunan usaha kelompok yang dibentuk dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan desa dapat terjadi hubungan atau komunikasi karena komunikasi yang baik menjelmakan koordinasi. Dengan cara demikian inilah yang dapat menilai mudahnya atau tidaknya hasrat berkoordinasi itu untuk dikembangkan. Dengan kegiatan-kegiatan bersama diadakan guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama antara orang-orang yang ada didalam kelompok kerja yang perlu dikoordinasikan dan dapat mendorong koordinasi dengan rangsangan terhadap bawahan.

Untuk menciptakan hasrat komunikasi, perlu koordinasi melalui kontak langsung antara kelompok yang bersangkutan dan yang terlibat, dan koordinasi hendaknya dimulai sejak semula. Koordinasi dalam hubungan timbal balik, sebab akibat dari semua faktor yang sangat mempengaruhi keadaan atau prosesnya.

Sebagai suatu proses yang berlanjut, koordinasi nampak lebih gampang menyelesaikan persoalan secara persaudaraan. Dari itu perlu ditanamkan pengertian dari tiap-tiap insan jauh sebelum dimulai untuk menghindarkan pertentangan di tengah operasional yang berlangsung. Dan kesadaran yang tulus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Seperti di Kecamatan Sahu usaha kelompok yang teratur dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan desa, maka berikut ini tanggapan responden yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang Usaha Kelompok
Dalam Pembangunan di Kecamatan Sahu

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Baik	34	36,56
2.	Kurang Baik	38	40,86
3.	Kurang Baik	17	18,28
4.	Tidak Baik	4	4,30
Jumlah		93	100,00

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004

Data pada tabel 8 di atas terlihat bahwa pilihan responden lebih dominan pada alternatif jawaban "cukup baik" yaitu 38 orang atau 40,86 persen responden dan "baik" 34 orang atau 36,56 persen responden. Kemudian 17 orang atau 18,28 persen responden yang menyatakan kurang baik, dan 4 orang atau 4,30 persen responden yang menyatakan "kurang baik".

Usaha kelompok dalam pembangunan desa di kecamatan Sahu , sikap kebersamaan merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan dalam usaha peningkatan pembangunan desa tersebut dalam rangka menunjang keberhasilan tujuan pembangunan selama ini. Oleh karena koordinasi ialah konsep yang ditetapkan dalam kelompok yang sangat penting dalam mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

5. Konsep Kesatuan Tindakan

mengenai kesatuan tindakan adalah merupakan inti dari pada koordinasi. Dalam usaha ini, pemimpin yang utama merupakan mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pad tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pad pemimpin untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik. Agar kesatuan usaha dapat berjalan seiring dengan waktu yang telah direncanakan dari pada koordinasi. Dalam usaha, pemimpin yang utama merupakan mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pad tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pada pemimpin untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik. Agar kesatuan usaha dapat berjalan seiring dengan waktu yang telah direncanakan, maka perlu mengatur jadwal waktu. Karena penentuan waktu yang tepat adalah sangat vital kalau tidak boleh dikatakan sangat menentukan.

Berkaitan dengan itu, untuk menelaah konsep kesatuan tindakan yang dilaksanakan kepala Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Tanggapan Responden Tentang Konsep Kesatuan Tindakan
Hubungan Dalam Pembangunan di Kecamatan Sahu

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Lancar	19	20,43
2.	Cukup Lancar	59	63,44
3.	Kurang Lancar	11	11,83
4.	Tidak Lancar	4	4,30
	Jumlah	93	100,00

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004

Berdasarkan data pada tabel 9 tersebut di atas, dari alternatif jawaban yang disodorkan maka yang dominan memberikan jawaban “cukup lancar” sebanyak 59 orang atau 63,44 persen responden, dan 19 orang atau 20,43 persen responden yang menyatakan “lancar”. Kemudian 11 orang atau 11,83 persen responden yang menyatakan “kurang lancar”, dan 4 orang atau 4,30 persen responden yang menyatakan “tidak lancar”.

Dengan memperhatikan penilaian responden tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konsep kesatuan tindakan dalam pelaksanaan pembangunan desa cukup penting yang merupakan kewajiban seorang pemimpin. Kesatuan tindakan ini sangat penting dalam menjalankan koordinasi yang baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya di Kecamatan Sahu .

6. Tingkat Pemberian Informasi dan Laporan Dalam Pembangunan Desa

Dalam perencanaan kegiatan-kegiatan, penyaluran informasi merupakan penunjang yang sangat penting. Hal ini perlu digalakkan dalam setiap kegiatan sehingga setiap informasi yang memerlukan pengkoordinasian dapat tersalurkan. Olehnya itu setiap pemimpin dapat menyalurkan bahwa setiap kegiatan terdapat bahan-bahan informasi dan laporan-laporan lain secara tepat. Disini kita mengambil sebuah patokan bahwa sebuah laporan yang bertele-tele, disamping sebagai tidak efisiennya penggunaan waktu, juga kurang tepat dalam mencapai sasaran yang semestinya merupakan orientasi dari tujuan.

Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembangunan di Kecamatan instansi vertikal dan dinas daerah berkewajiban memberikan informasi dan pelaporan segala bentuk kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan serta mematuhi segala petunjuk yang diberikan oleh Kepala Wilayah dengan baik. Maka untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diharapkan agar instansi vertikal dan dinas daerah dalam menyusun rencana maupun dalam pelaksanaannya memperhatikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh Kepala Wilayah, serta memperhatikan segala kepentingan masyarakat dan mampu menserasikan adanya perencanaan dari pusat dan perencanaan bawah.

Dari itu, untuk memberikan gambaran yang besar tentang tingkat pemberian informasi dan laporan dalam pembangunan desa di Kecamatan Sahu, berikut ini dapat terlihat pada tabel :

Tabel 10
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pemberian Informasi dan
Laporan Dalam Pembangunan di Kecamatan Sahu

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Lancar	44	47,31
2.	Cukup Lancar	41	44,09
3.	Kurang Lancar	4	4,30
4.	Tidak Lancar	4	4,30
Jumlah		93	100,00

Sumber data : hasil pengolahan data primer, 2004

Pada tabel di atas, memperlihatkan bahwa tingkat pemberian informasi dan laporan dalam pembangunan di kecamatan Sahu dari penilaian responden, bahwa untuk penilaian "lancar" ada 44 orang atau 47,31 persen responden, dan 41 orang atau 44,09 persen responden yang menyatakan "cukup lancar". Sedangkan masing-masing 4 orang atau 4,30 persen responden yang menyatakan "kurang lancar" dan "tidak lancar".

Ini membuktikan bahwa tingkat pemberian informasi dan laporan ini merupakan salah satu aspek terselenggaranya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu hal ini agar lebih diupayakan agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat dicapai dan memberikan hasil semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat utamanya masyarakat di pedesaan.

7. Partisipasi Instansi Terkait Dalam Penggunaan Desa di Wilayah Kecamatan Sahu

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa sasaran akhir yang hendak dicapai pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terwujudnya yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. adil dan makmur dimaksud merupakan fasilitas dan keseimbangan serta keserasian berbagai aspek hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Instansi terkait yang mempunyai tugas untuk mengembangkan dan meningkatkan upaya tercapainya tujuan dari pemerintah yang telah diintegrasikan dari aspek kepentingan dan pengaruh bidang tugas serta disinkronisasikan pelaksanaannya.

Koordinasi yang merupakan integrasi dan disinkronisasikan pelaksanaan berbagai bidang tugas pemerintahan. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait akan diperoleh cakrawala yang lebih luas bukan saja tentang fungsi dan tugas suatu instansi Juga diperoleh gambaran dan hubungan pelaksanaan tugas tertentu sebagai tujuan secara optimal. Dengan demikian merupakan suatu bentuk partisipasi instansi terkait dalam pembangunan pada umumnya dan khususnya pembangunan desa.

Mengenai partisipasi instansi terkait dalam pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Sahu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Instansi Terkait Dalam
Pembangunan di Wilayah Kecamatan Sahu

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Baik	28	30,11
2.	Cukup Baik	47	50,54
3.	Kurang Baik	11	11,83
4.	Tidak Baik	7	7,53
Jumlah		93	100,00

Sumber data : hasil pengolahan data primer, 2004

Data pada tabel 11 tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi instansi terkait dalam pembangunan desa dianggap cukup baik. Hal ini didasarkan atas penilaian responden dari alternatif yang disodorkan tersebut yaitu 47 orang atau 50,54 persen responden yang menjawab “cukup baik” dan 28 orang atau 30,11 persen yang menyatakan “baik”. Kemudian 11 orang atau 11,83 persen responden yang menyatakan kurang baik, dan 7 orang atau 7,53 persen responden yang menyatakan “tidak baik”.

Kenyataan di atas menggambarkan bahwa partisipasi instansi terkait di atas sangat penting artinya bagi keberhasilan pembangunan desa. Untuk itu aparat pemerintah sebagai koordinator pembangunan dan bertanggungjawab atas terselenggaranya roda pemerintahan, hendaknya mampu menggerakkan partisipasi instansi terkait untuk lebih ditingkatkan lagi dengan jalan meningkatkan kesadaran dalam penyelenggaraan pembangunan.

B. Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Wilayah Kecamatan Sahu.

1. Perencanaan Pembangunan

Masalah perencanaan pembangunan umumnya dan perencanaan pembangunan desa khususnya semakin terasa manfaatnya dan memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Karena itu berdasar atau ditinjau dari tujuan pokok pembangunan tidak lain adalah menemukan, menciptakan dengan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan dengan bahan baku yang tersedia. Mengenai keseimbangan tersebut mustahil dapat tercapai, akan tetapi setidaknya-tidaknya hal tersebut dapat didekati. Dalam upaya penyelenggaraan yang nyata dapat saja berwujud berupa pembangunan fisik dan non fisik. Dengan tujuan tersebut masyarakat digiring untuk mengerti mengenai tujuan pembangunan tersebut.

Dengan perencanaan yang terarah benar-benar menjamin adanya perencanaan merupakan aspek yang utama baru pelaksanaan dan evaluasi atau penilaian. Untuk melihat betapa pentingnya perencanaan ini sebagai salah satu aspek keberhasilan pembangunan, misalnya dalam rangka pengamanan pembiayaan pembangunan seperti bantuan subsidi dan bantuan-bantuan lainnya, perencanaan sangat dibutuhkan karena perencanaan yang mantap maka orientasi yang mantap maka orientasi utama yang pokok bantuan dapat tercapai dan digunakan untuk masyarakat seperti halnya untuk menggerakkan swadaya.

Berkaitan dengan itu mengenai perencanaan ini telah dilakukan oleh pemerintah Wilayah di Kecamatan Sahu, dengan jalan menyusun perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan lebih cermat dan terarah. Hal ini telah dirintis secara berkesinambungan dan secara kontinyu. Ini terbukti dengan pelaksanaan perencanaan ini beberapa keberhasilan pengembangan yang telah dilaksanakan telah dicatat dan dipelajari dan dijadikan dasar atau dimanfaatkan untuk perencanaan selanjutnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang telah dipraktekkan di Wilayah Kecamatan Sahu dan banyak program yang telah menjamin pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang selama ini digalakkan.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan nasional. Pembangunan desa bersifat multi sektoral sehingga dengan sendirinya dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu. Dalam pengertian terpadu ini adalah terpadu dalam pelaksanaan dan terpadu dalam perencanaan sehingga hasil yang optimal dapat diraih dan berguna.

Pembangunan itu sendiri sebagai metode pembangunan dalam rangkan mewujudkan cita-cita bangsa, melalui pembangunan pedesaan karena masyarakat adalah subjek pembangunan dan sebagai program dalam pelaksanaan serta gerakan secara menyeluruh di pedesaan..

Sebagai gerakan diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk memantapkan dirinya kepada keadaan yang lebih baik. Dalam hubungan ini maka peranan kepemimpinan sangat mendasar. Di dalam berbagai penelitian keberhasilan dari pada pembangunan desa tampak besar sekali disebabkan oleh kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah tertentu sebagai koordinasi pembangunan beserta instansi vertikal dan Dines Daerah di Kecamatan Sahu dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 12
Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Atas Rencana Yang Telah Ditetapkan

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Lancar	55	59,14
2.	Cukup Lancar	28	30,11
3.	Kurang Lancar	7	7,53
4.	Tidak Lancar	3	3,22
	Jumlah	93	100,00

Sumber data : hasil pengolahan data primer, 2004

Pada tabel 12 di atas, terlihat pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasar atas rencana yang telah ditetapkan didapatkan jawaban responden.

yaitu 55 orang atau 59,14 persen responden yang menyatakan "lancar" dan 28 orang atau 30,11 persen responden yang menjawab "cukup lancar". Kemudian 7 orang atau 7,53 persen responden yang memberi jawaban "kurang lancar", dan 3 orang atau 3,22 persen responden yang memberi alternatif penilaian "tidak lancar".

Hal di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan akan rencana yang telah ditetapkan akan berjalan dengan baik. Berarti kegiatan pembangunan Di Wilayah Kecamatan Sahu terus digalakkan sebagaimana di daerah-daerah lainnya. Olehnya itu - antar pemerintah, pihak terkait dan masyarakat sadar sepenuhnya, bahwa pembangunan perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Hambatan dan Tindak Lanjut

Dengan adanya sejumlah aspek yang dilaksanakan dalam pembangunan di desa, memang tidak terlepas dari kendala dan hambatan-hambatan yang mengganjal dalam penyelenggaraannya. Faktor penghambat yang dimaksud ialah hal-hal yang memungkinkan suatu upaya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan, walaupun dengan sejumlah potensi yang ada.

Mengenai partisipasi masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Sahu dalam menunjang pelaksanaan koordinasi pembangunan desa dianggap kurang, masih banyak masyarakat kurang menyadari arti dan tujuan pembangunan itu

sendiri. Malahan ada yang beranggapan bahwa pembangunan itu adalah tanggung jawab pemerintah semata.

Asumsi di atas satu sisi memang bisa dibenarkan karena pelaksanaan pembangunan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi dalam mensukseskan pembangunan sangat ditunjang oleh partisipasi masyarakat setempat karena berhasil tidaknya pembangunan tergantung banyak dari tanggapan, pengertian, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Sehingga disesalkan bahwa banyak masyarakat yang seharusnya bisa jadi pelopor pembangunan malahan menunjukkan sikap mental, yang sukar diajak membangun dan kaku.

Selain itu aspek lain yang merupakan faktor penghambat dalam pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Sahu, adalah kurangnya tenaga yang berkualitas yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa masih terbatasnya tingkat pendidikan yang bisa dijadikan pelaksana pembangunan.

Faktor penghambat lain adalah masalah dana. Dana yang digunakan oleh pembangunan desa cukup terbatas sehingga tidak dapat terlaksana. Jadi hanya proyek-proyek vital saja yang diupayakan, walaupun masih banyak proyek lain yang tak kurang pentingnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu adalah faktor transportasi dan komunikasi. Hal ini wajar karena di Wilayah Kecamatan Sahu sebagian besar pulau-pulau yang merupakan kondisi yang sulit dijangkau

oleh alat transportasi dan masih ada saja desa terpencil yang masih jarang dikunjungi.

Itulah beberapa faktor penghambat pelaksanaan koordinasi pembangunan desa di Kecamatan Sahu yang perlu dicari pemecahannya atau jalan keluarnya.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka pemerintah menempuh cara lain, yaitu dari masyarakat pemerintah mengadakan penyuluhan secara berkala dengan cara menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah merupakan untuk masyarakat sendiri. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa dengan upaya tersebut dapat mengiring masyarakat untuk sadar dalam keterlibatan berpartisipasi dalam pembangunan di setiap sektor.

Dalam mengantisipasi tenaga yang berkualitas ini pemerintah setempat memberikan bantuan kesempatan bagi tenaga-tenaga penggerak dalam rangka meningkatkan pengetahuan yang dapat terhadap pelaksanaan dijadikan moment Pembangunan desa. dan memberikan untuk belajar peningkatan.

Mengenai dana pembangunan pemerintah setempat telah beberapa kebijaksanaan antara lain mengikut masyarakat yang berpenghasilan tinggi untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan khusus menempuh sertakan membantu mengenai transportasi dan komunikasi, pemerintah wilayah telah berusaha melibatkan anggota masyarakat yang berpotensi untuk mengembangkan sarana tersebut. Hal ini diupayakan untuk lebih meningkatkan penghasilan mereka. Juga dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam rangka mengantisipasi keuangan tersebut.

D. Hasil Yang Dicapai

Pemerintah di Wilayah Kecamatan Sahu beserta seluruh aparatnya dan warganya terus menggalakkan pembangunan desa dengan maksud agar tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain yang di Kabupaten Halmahera Barat. Sejak dari pelita ke pelita telah ditingkatkan laju Pertumbuhan pembangunan daerahnya. Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan secara nyata pemerintah dan rakyat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, selain sebagai tanggung jawab pemerintah wilayah kecamatan sebagai koordinator pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam mengemukakan hasil yang telah diperoleh oleh Wilayah Kecamatan Sahu selama pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan desa telah terlihat pendidikan formal pada tingkat Sekolah Dasar mulai tumbuh dan berkembang dengan ditambahnya Sekolah Dasar (SD) Inpres.

Di bidang penerapan tidak lagi mengalami kesulitan karena di Wilayah Kecamatan Sahu yang terdiri dari beberapa desa dapat dijangkau RRI, Radio Swasta dan TVRI dan adanya koran atau mas media yang sangat membantu dalam penyampaian pesan-pesan mengenai pembangunan kepada masyarakat serta pembangunan prasarana dan sarana mendapat prioritas utama seperti sarana pendidikan dan perhubungan, serta ekonomi dan lain-lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka beberapa kesimpulan dapat penulis paparkan sesuai dengan hasil pembahasan dari data serta informasi yang diperoleh di lokasi penelitian sebagai berikut

1. Pelaksanaan koordinasi pembangunan di Kecamatan Sahu dipandang cukup memadai. Hal ini ditunjukkan oleh
 - a. Koordinasi pembangunan yang diterapkan telah sesuai dengan mekanisme koordinasi pembangunan PP No. 6 Tahun 1988 pasal 1. Dan juga didukung adanya diskusi unit daerah kerja pembangunan (UDKP) Yang dihadiri oleh unsur-unsur instansi vertikal, Kepala Desa/Lurah dan masyarakat. Diskusi tersebut dipimpin oleh Camat, hal ini didukung pula oleh tanggapan responden tentang hubungan kerja sama dalam koordinasi pembangunan desa yang dinilai "cukup baik" dimana dari 62,37 persen responden yang cukup baik dan 32,26 persen responden yang menyatakan "baik".
 - b. Adanya forum pelaksanaan/perencanaan koordinasi pembangunan seperti unit daerah kerja pembangunan di tingkat kecamatan dan musyawarah pembangunan desa yang, mendapat respon yang baik dari unsur-unsur pelaku pembangunan yaitu camat, instansi vertikal, dinas daerah, kepala Desa/Lurah dan masyarakat sebagai sumber inspirasi pembangunan. Hal ini didukung oleh tanggapan responden tentang usaha kelompok dalam

pembangunan desa yang dominan yaitu sebanyak 40,86 persen yang memberi jawaban “cukup baik” dan “36,56 persen responden yang memberi jawaban “ baik”.

c. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan Sahu juga dipandang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari prosedur yang diterapkan yaitu secara teknis dan dana yang kedua-duanya telah dilaksanakan seefisien mungkin serta berhasil guna dan berdaya guna yang sebelumnya telah didiskusikan terlebih dahulu di forum yang ada yaitu unit daerah kerja pembangunan dan musyawarah pembangunan desa.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan koordinasi pembangunan desa di wilayah Kecamatan Sahu sebagai berikut :

- a. Kurangnya tenaga yang berkualitas yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa masih terbatasnya tingkat pendidikan yang bisa dijadikan pelaksana pembangunan.
- b. Partisipasi masyarakat yang kurang, masyarakat wilayah Kecamatan Sahu kurang menyadari arti dan tujuan pembangunan serta beranggapan bahwa pembangunan itu adalah tanggung jawab pemerintah semata.
- c. Dana yang terbatas, dana yang digunakan dalam Pembangunan desa cukup terbatas sehingga proyek-proyek vital saja yang diupayakan, walaupun masih banyak proyek lain yang tidak kalah pentingnya untuk kepentingan masyarakat.

- d. Faktor transportasi dan komunikasi. Hal ini wajar karena di wilayah Kecamatan Sahu sebagian besar bukti-bukti yang merupakan kondisi yang sulit dijangkau oleh sarana transportasi yang otomatis komunikasi antar pelaksana pembangunan jadi agak terganggu.
3. Faktor pendukung pelaksanaan koordinasi pembangunan desa di Kecamatan Sahu , yaitu adanya kemauan kerjasama antara unsur-unsur pelaku pembangunan baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan pembangunan desa. Juga adanya ketaatan untuk mematuhi hasil-hasil musyawarah pembangunan di Kecamatan Sahu .
 3. Hasil pembangunan yang dicapai oleh wilayah Kecamatan Sahu dipandang cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh telah terpenuhinya kebutuhan masyarakat antara lain
 - a. Pembangunan bidang sosial ekonomi dan sosial budaya di wilayah Kecamatan Sahu telah cukup memadai di lihat dari stratifikasi masyarakatnya yang rata-rata sudah hidup mapan dan sudah lepas dari garis kemiskinan serta dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga rukun antar sesama warga masyarakat dan menganut norma-norma serta adat yang mengatur perilaku sehari-hari di bidang agama. Masyarakat Kecamatan Sahu taat dan patuh pada agama yang dianut serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Di bidang ekonomi didukung oleh adanya industri-industri kecil yang dibina oleh Koperasi Unit Desa (KUD), adanya pengrajin-pengrajin yang

mendukung perluasan mata pencaharian serta meningkatkan pendapatan warga masyarakat di desa-desa Kecamatan Sahu .

b. Pembangunan bidang fisik.

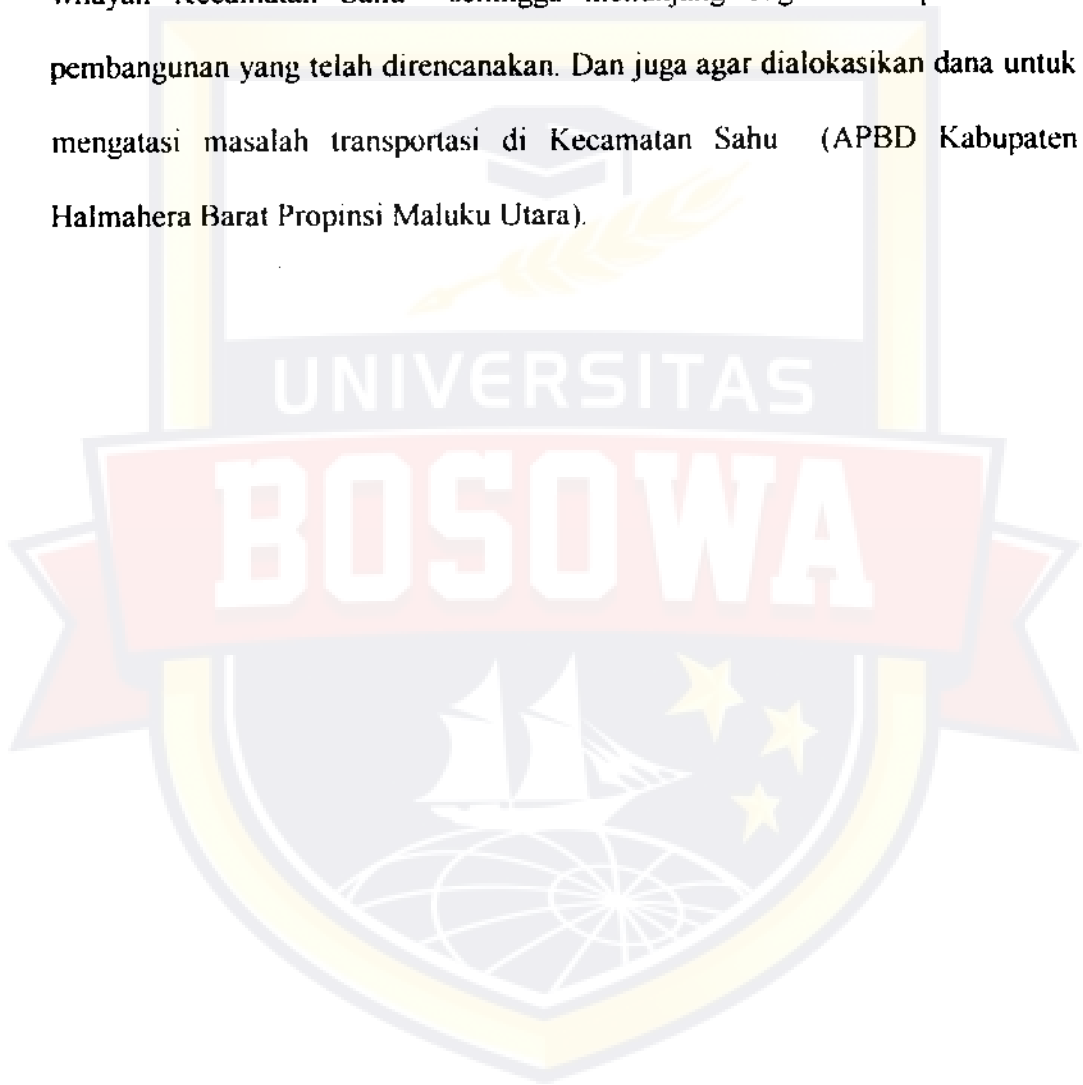
Pembangunan bidang fisik juga dianggap cukup baik dengan dibangunnya sarana dan prasarana pendidikan berupa gedung sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Jalan-jalan desa sebagian besar sudah diaspal, adanya MCK mum dan adanya pasar.

B. Saran-Saran

Berhubung ditemukannya beberapa hal yang masih perlu dibenahi atau dicarikan jalan keluarnya dari hasil pengertian ini, sesuai dengan kesimpulan di atas maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan mengenai pentingnya partisipasi di dalam pembangunan agar dapat menghapus asumsi masyarakat bahwa pembangunan itu adalah tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi dalam menyukkseskan Pembangunan sangat ditunjang oleh partisipasi masyarakat setempat karena berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari tanggapan, pengertian, kesadaran, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.
2. Agar dilakukan pelatihan tentang perencanaan pembangunan bagi aparat desa dan kecamatan guna meningkatkan kualitas mereka.

3. Agar masalah dana transportasi dan komunikasi dapat diantisipasi untuk menunjang keberhasilan penelitian pelaksanaan koordinasi pembangunan desa. Hal tersebut dapat dipecahkan dengan menggali segala potensi yang ada di wilayah Kecamatan Sahu sehingga menunjang bagi usaha pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Dan juga agar dialokasikan dana untuk mengatasi masalah transportasi di Kecamatan Sahu (APBD Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara).



DAFTAR PUSTAKA

- Beretha, I Nyoman; 11982; *Desa, masyarakat desa dan pembangunan desa*; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Handayanigrat, Soerwarno, dkk; 1983; *Landasan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintahan Daerah, Kota dan Desa*; CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1993; *Metode Penelitian Sosial*; CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Koesoemahatmaja, R.D.H; 1979; *Peran Administrasi Dalam Pembangunan*; PT. Eresco Bandung.
- Livingstone, Robert; 1987; *Dasar-dasar Organisasi*; Gama, Yogyakarta.
- Musanef; 1991; *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.
- Miftah Thoha; 1987; *Perspektif Perilaku Birokrasi*; CV. Rajawali, Jakarta.
- ; 1999; *Kepemimpinan Dalam Manajemen*; Rajawali Pers, Jakarta.
- Moekijat; 1995; *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*; Haji Masagung, Jakarta.
- Nasir, Moh; 1988; *Metode Penelitian*; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990; *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*; Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1980; *Kamus Umum Bahasa Indonesia PN*, Balai Pustaka Jakarta.
- Sadu; 1991; *Bewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Camat*; Aksara Baru, Jakarta.
- Sutarto. 1993; *Dasar-Dasar Organisasi*; Gama University, Yogyakarta.
- Siagian, S.P, 1986; *Administrasi Pembangunan*; Gunung Agung, Jakarta.